

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Bab XI pasal 279-330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara spesifik pengelolaan keuangan Daerah Kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Periode kinerja keuangan Kota Bukittinggi disajikan untuk periode tahun 2010-2015, serta untuk memenuhi teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 diperoleh dari Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2015. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2010-2015.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Kota Bukittinggi terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

Komponen Pendapatan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Komponen Belanja:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Komponen Pembiayaan:

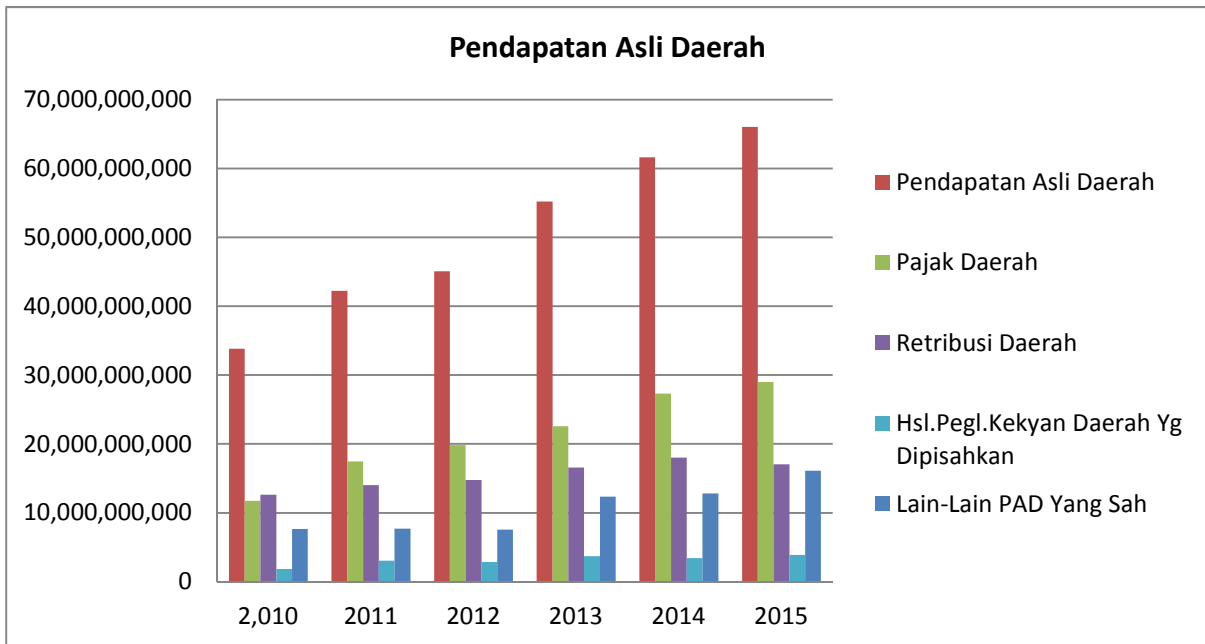
- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Ringkasan APBD Kota Bukittinggi berdasarkan rincian obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

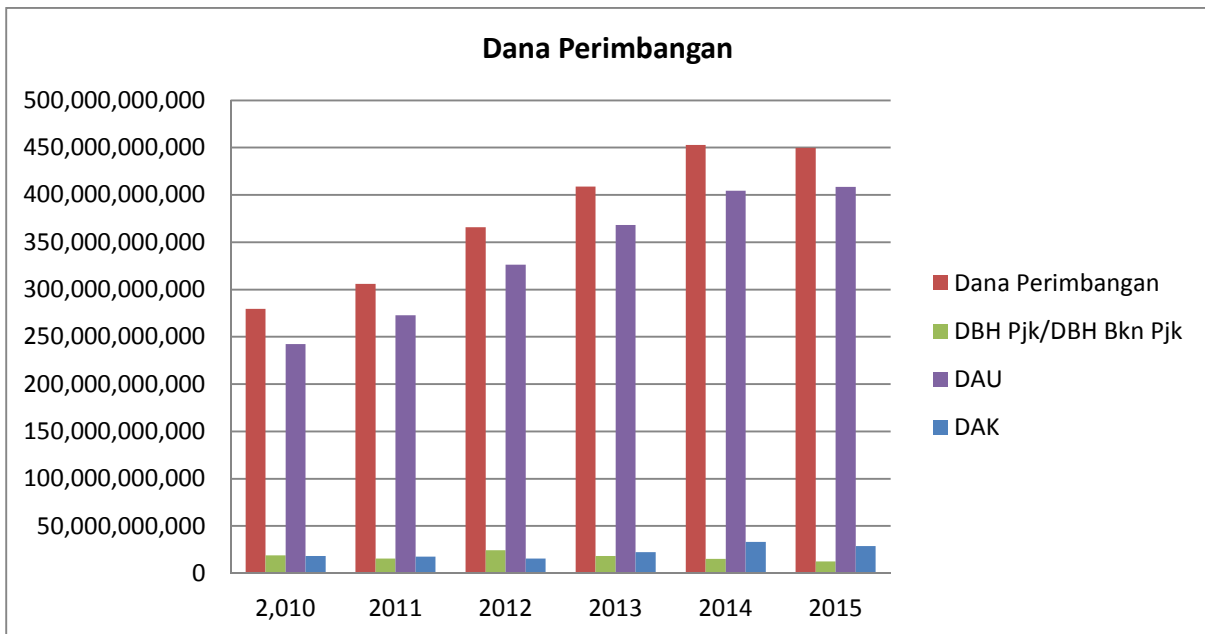
Tabel.3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2010 s.d. 2015
Kota Bukittinggi

N O	URAIAN	2010 (% Distribusi)	2011 (% Distribusi)	2012 (% Distribusi)	2013 (% Distribusi)	2014 (% Distribusi)	2015 (% Distribusi)	Rata- Rata Pert umb uhan (%)
	Pendapatan	338.421.473.678	401.417.194.463.	461.396.488.849.	527.475.062.408.	595.424.983.587.	593.323.296.014	10,45
	Pendapatan Asli Daerah	33.847.174.752 (10%)	42.223.418.002. (10,52%)	45.076.555.841. (9,77%)	55.203.591.605. (10,47%)	61.613.681.043. (10,35%)	66.027.359.716 (11,13%)	12,32
1.	Pajak Daerah	11.728.705.362 (34,65%)	17.461.926.058. (41,36%)	19.848.460.300. (44,03%)	22.560.666.814. (40,87%)	27.314.135.978. (44,33%)	29.002.326.911 (43,92%)	16,02
2.	Retribusi Daerah	12.609.831.129 (37,26%)	14.019.848.821. (33,20%)	14.748.993.711. (32,72%)	16.593.461.861. (30,06%)	18.043.436.304. (29,28%)	17.032.946.210 (25,80%)	5,64
3.	Hsl.Pegl.Kek yan Daerah Yg Dipisahkan	1.829.523.928 (5,41%)	3.038.188.054. (7,20%)	2.892.369.763. (6,42%)	3.691.819.262. (6,69%)	3.452.740.700. (5,60%)	3.884.306.585 (5,88%)	11,28
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	7.679.114.333 (22,69%)	7.703.455.069. (18,24%)	7.586.732.067. (16,83%)	12.357.643.668. (22,38%)	12.803.368.061. (20,79%)	16.107.780.010 (24,40%)	12,28
	Dana Perimbangan	279.481.878.176 (82,58%)	305.965.314.648. (76,22%)	365.938.810.846. (79,31%)	408.814.962.363. (77,50%)	452.713.545.419. (76,03%)	449.872.722.059 (75,82%)	8,92
1	DBH Pjk/DBH Bkn Pjk	18.988.138.176 (6,80%)	15.621.671.648. (5,11%)	24.281.551.846. (6,63%)	18.143.222.363. (4,44%)	15.279.128.419. (3,38%)	12.555.527.059 (2,79%)	(12,03)
2	DAU	242.306.440.000 (86,70%)	272.853.718.000. (89,18%)	326.224.306.000. (89,15%)	368.311.195.000. (90,09%)	404.285.567.000. (89,30%)	408.640.651.000 (90,83%)	9,80
3	DAK	18.187.300.000 (6,50%)	17.489.925.000. (5,71%)	15.432.953.000. (4,22%)	22.360.545.000. (5,47%)	33.148.850.000. (7,32%)	28.676.544.000 (6,38%)	6,12
	Lain-Lain Pdpt Yg Sah	25.092.420.750 (7,41%)	53.228.461.813. (13,26%)	50.381.122.162. (10,92%)	63.456.508.440. (12,03%)	81.097.757.125. (13,62%)	77.423.214.239 (13,05%)	16,96
1	Hibah	-	26.136.000. (0,05%)	-	-	-	-	-
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
3	DBH Pjk Prov	9.110.622.360 (36,31%)	11.633.826.985. (21,85%)	10.859.729.931. (21,56%)	12.218.976.000. (19,25%)	17.263.679.125. (21,29%)	21.308.056.239 (27,52%)	14,78
4	Dana Otsus	-	10.112.825.000. (19%)	-	49.740.773.000. (78,39%)	61.623.658.000. (75,99%)	52.991.158.000 (68,44%)	0,60
5	Bantuan Keuangan	307.600.000 (1,23%)	589.200.000. (1,11%)	-	1.496.759.440. (2,36%)	2.210.420.000. (2,73%)	3.124.000.000 (4,04%)	22,07
6	Lain-Lain Pdpt Yg Sah	15.674.198.390. (62,47%)	30.866.473.828.. (57,99%)	39.521.392.231. (78,44%)	-	-	-	14,22

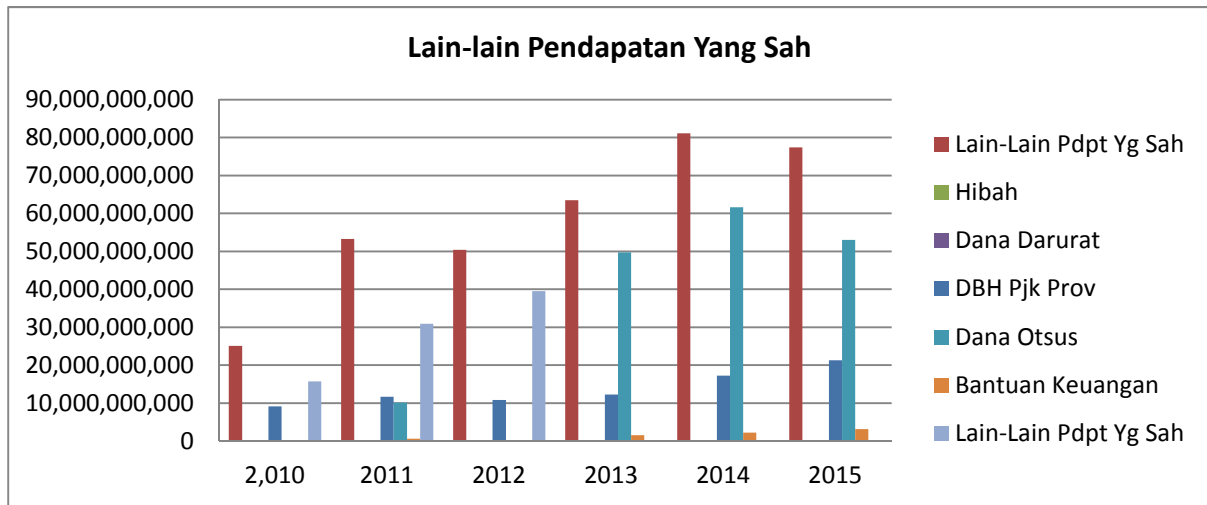
GRAFIK 3.1.1



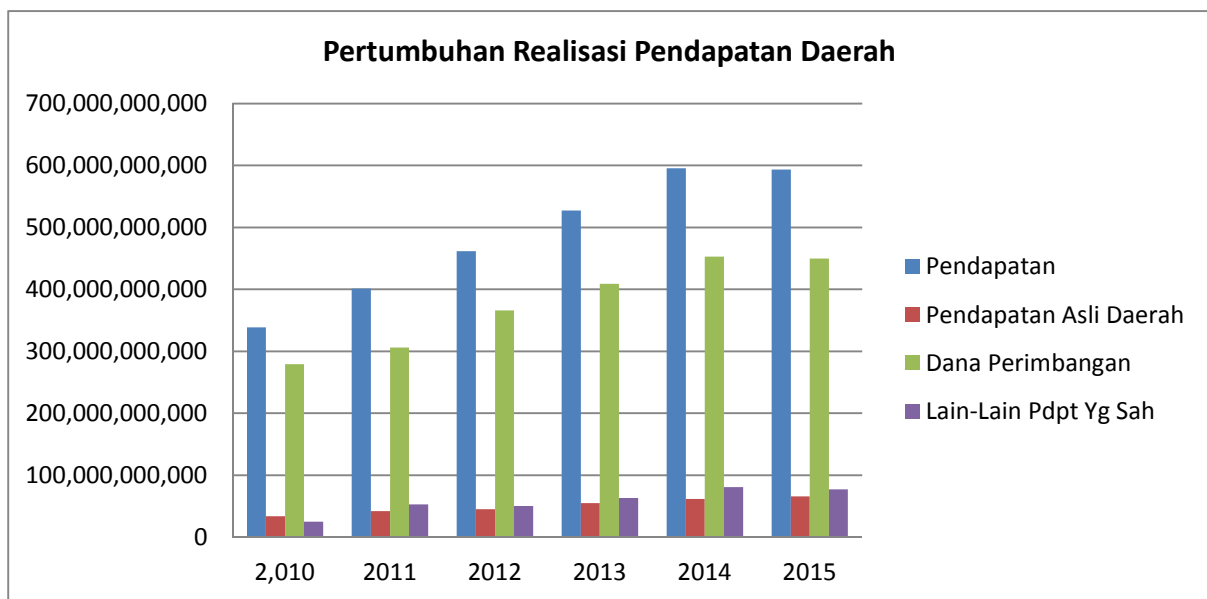
GRAFIK 3.1.2



GRAFIK 3.1.3



GRAFIK 3.1.4



3.1.1.1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2010 – 2015 yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, kecuali pada tahun 2015 pendapatan daerah turun sekitar (0,35%) atau sekitar

Rp.2.101.687.573,- namun secara rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10,45%, seperti terlihat pada **Tabel.3.1**

Berdasarkan tabel rata-rata realisasi pertumbuhan dan kontribusi pendapatan rata-rata selama tahun 2010-2015 sebesar 10,45% per tahun dan kontribusi pertumbuhan rata-rata per-obyek pendapatan terhadap total pendapatan daerah dominasi paling besar adalah dana perimbangan dengan persentase sebesar 76,98% dari Total Pendapatan, sedangkan PAD sebesar 10,44% dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 12,58%.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami rata-rata pertumbuhan selama tahun 2010 – 2015 sebesar 11,99% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah telah berhasil melampaui target yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2010 – 2015 yang ditargetkan rata-rata sebesar 8,63% per tahun. Pencapaian target tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam upaya meningkatkan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/ pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Namun demikian jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif kecil, ketergantungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi. **Kontribusi penerimaan yang berasal dari dana perimbangan sebesar 76,98%, PAD sebesar 10,44%, dan lain-lain penerimaan pendapatan daerah yang sah sebesar 12,58%**, hal tersebut dapat diartikan bahwa kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Perkembangan realisasi Penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,36% per tahun, dengan kontribusi terbesar pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,82% per tahun. Kenaikan Penerimaan Dana Perimbangan tersebut menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menggali potensi pada pos-pos Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang positif.

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami pertumbuhan yang meningkat, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan. Penerimaan pada Pos ini bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota untuk mendanai program/kegiatan pembantuan yang ada di Kota Bukittinggi. Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah rata-rata selama 5 tahun terakhir, untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kota dengan menganut prinsip-prinsip; (1) Potensial, lebih menitik beratkan pada potensi dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan; dan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya. Sedangkan asumsi target penerimaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, dari hasil akumulasi target tahunan sebesar Rp **314.841.617.600,-** realisasinya tercapai sebesar Rp **303.991.780.959,-** atau **96,55** persen, Realisasi Pajak Daerah selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, dimana dari total target Pajak Daerah sebesar Rp **130.209.442.522,-**, terealisasi sebesar Rp **127.916.221.423,-** atau tercapai **98,24** persen.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Retribusi Daerah secara akumulasi sebesar Rp. **106.913.814.509,-** dan realisasinya belum mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. **93.048.518.036,-** atau **87,03** persen.

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara akumulasi sebesar Rp. **18.975.995.491,-** realisasinya mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. **18.733.089.292,-** atau **101,30** persen.

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari: (a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi, (f) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah; (g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (h) Pendapatan Denda Pajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; (k) Pendapatan dari Pengembalian; (l) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (m) Pendapatan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (n) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (o) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. **58.798.224.074,-** sedangkan realisasinya melebihi target yang ditetapkan, mencapai Rp. **64.238.093.208,-** atau mengalami pencapaian sebesar **109,25** persen.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 diproyeksikan sebesar 8,63% per tahun, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,99%;
- b. Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan ke Pemerintah daerah pada tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diserahkan ke Pemerintah Daerah pada tahun 2014; serta
- c. Upaya serius dari pemerintah Kota Bukittinggi dalam menggali potensi sumber-sumberpendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Pada penerimaan PAD yang menjadi unggulan dan memiliki kontribusi besar dalam menyokong penerimaan PAD adalah **Pajak Daerah** sebesar **42,90 %** yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan. **Retribusi Daerah** sebesar **30,21%** yang meliputi **Retribusi Jasa Umum** (Ret.Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, **Retribusi Jasa Usaha** (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Rekreasi dan Olah Raga, **Perizinan Tertentu** (Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek, dan penerimaan lain PAD yang sah sebesar **20,53%**, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar **6,36%**.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan, target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **2.286.534.516.457,-** Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, akumulasi Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. **2.217.787.233.515,-** atau **96,99** persen dari target, Secara keseluruhan, target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp. **103.018.779.457,-**sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. **104.869.239.515,-** atau **101,80** persen dari target, Penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp. **2.022.621.877.000,-** sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. **2.022.621.877.000,-** atau **100** persen dari target, Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus selama periode 2010 - 2015 adalah sebesar Rp.**160.893.860.000,-** sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. **135.296.117.000,-** atau tercapai sebesar 84,09 persen.

Proyeksi penerimaan dari Dana Perimbangan pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 sebesar 10%, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu lima tahun terakhir yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,36%.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pos yang memiliki Kontribusi terbesar dalam menyokong penerimaan Dana Perimbangan yakni sebesar 89,71%. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, DAU diberikan berdasarkan celah fiskal/keuangan dan alokasi dasar. Celah fiskal/keuangan merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal/keuangan daerah. Kebutuhan daerah merupakan variable-variable yang ditetapkan undang-undang antara lain penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan indeks harga, perhitungan kapasitas keuangan didasarkan atas PAD dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, sedangkan alokasi dasar merupakan pemenuhan gaji PNS. Kebutuhan fiskal Kota Bukittinggi ditahun-tahun mendatang akan mengalami peningkatan seiring dengan Penduduk Kota Bukittinggi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,87% per tahun, luas wilayah, penduduk miskin relatif sebesar 5,6% dan pengadaan CPNS Kota Bukittinggi dengan pemenuhan akan gaji PNS daerah.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah secara akumulasi melampaui target. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, ditargetkan sebesar Rp. **340.842.743.990,-** dengan realisasi sebesar Rp. **350.679.484.529,-** atau sebesar **102,89** persen.

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah tidak ditargetkan jumlah pendapatannya, namun pada tahun 2011 Kota Bukittinggi mendapatkan Hibah sebesar Rp. **26.136.000,-**. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ditargetkan sebesar Rp. **186.794.979.000,-** sedangkan realisasinya sebesar Rp. **174.468.414.000,-** atau mencapai sebesar **93,40** persen, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya secara akumulasi, targetnya sebesar Rp. **77.118.320.818,-** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **82.394.890.640,-** atau tercapai sebesar **106,84** persen, yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya secara akumulasi targetnya sebesar Rp. **7.141.518.600,-** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **7.729.979.440,-** atau tercapai sebesar **108,21** persen, yang bersumber dari lain-lain Penerimaan secara akumulasi targetnya sebesar Rp. **69.766.723.000,-** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **86.062.064.449,-** atau sebesar **123,36** persen.

Penerimaan pada pos ini juga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 10,97% per tahun. Kontribusi terbesar pada pos Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 48,36%, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya sebesar 22,29%, dan Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 2,06% serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lainnya sebesar 27,29%. Dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan, maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus secara intensif melakukan koordinasi menggali potensi penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pendapatan daerah pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 yang terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10% per tahun.

3.1.1.2. Perkembangan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*).

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, dari akumulasi target Belanja Daerah sebesar Rp3.343.124.025.465,- terealisasi sebesar Rp. **2.834.893.644.355,-** atau **84,80** persen, Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).

1) Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, dan (f) Belanja Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 terealisasi sebesar Rp. **1.739.746.049.355,-** atau **91.64** persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. **1.898.433.383.308,-**

Target Belanja Pegawai Kota Bukittinggi selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **1.757.677.357.269,-** dengan realisasi sebesar Rp. **1.413.091.313.487,-** atau **80,40** persen, Target Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp. **84.628.170.220,-** dengan realisasi sebesar Rp. **69.532.386.181,-** atau **82,16** persen Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. **33.878.792.553,-** atau **80,34** persen dari target sebesar Rp. **42.169.401.279,-**, Target Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 Rp. **3.420.839.799,-** dengan realisasi sebesar Rp. **1.909.810.999,-** atau **55,83** persen, Target Belanja Tidak Terduga (BTT) selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **6.937.614.741,-** dengan realisasi sebesar Rp. **1.227.178.239,-** atau **17,69** persen. Penganggaran belanja tidak terduga tidak dapat diprediksi dan diluar kendali

Pemerintah Daerah. Belanja ini merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa, bersifat berjaga-jaga.

2. Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara akumulatif tidak mencapai target, yaitu terealisasi sebesar Rp. **1.095.147.595.000,-** dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. **1.444.690.642.156,-** atau **75,81** persen.

Target Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **277.560.660.266,-** dengan realisasi sebesar Rp. **236.484.907.837,-** atau **85,20** persen, Target Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **656.615.740.294,-** sedangkan realisasinya sebesar Rp. **487.791.423.754,-** atau **74,29** persen, Belanja Modal pada Belanja Langsung, selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 terealisasi Rp. **370.871.263.409,-** atau **72,65** persen dari target sebesar Rp. **510.514.241.596,-**. Struktur belanja Pemerintah Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa Belanja Langsung (39,03%) lebih kecil dari pada Belanja Tidak Langsung (60,97%).

Gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi selama tahun 2010 – 2015 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel.3.2
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kota Bukittinggi

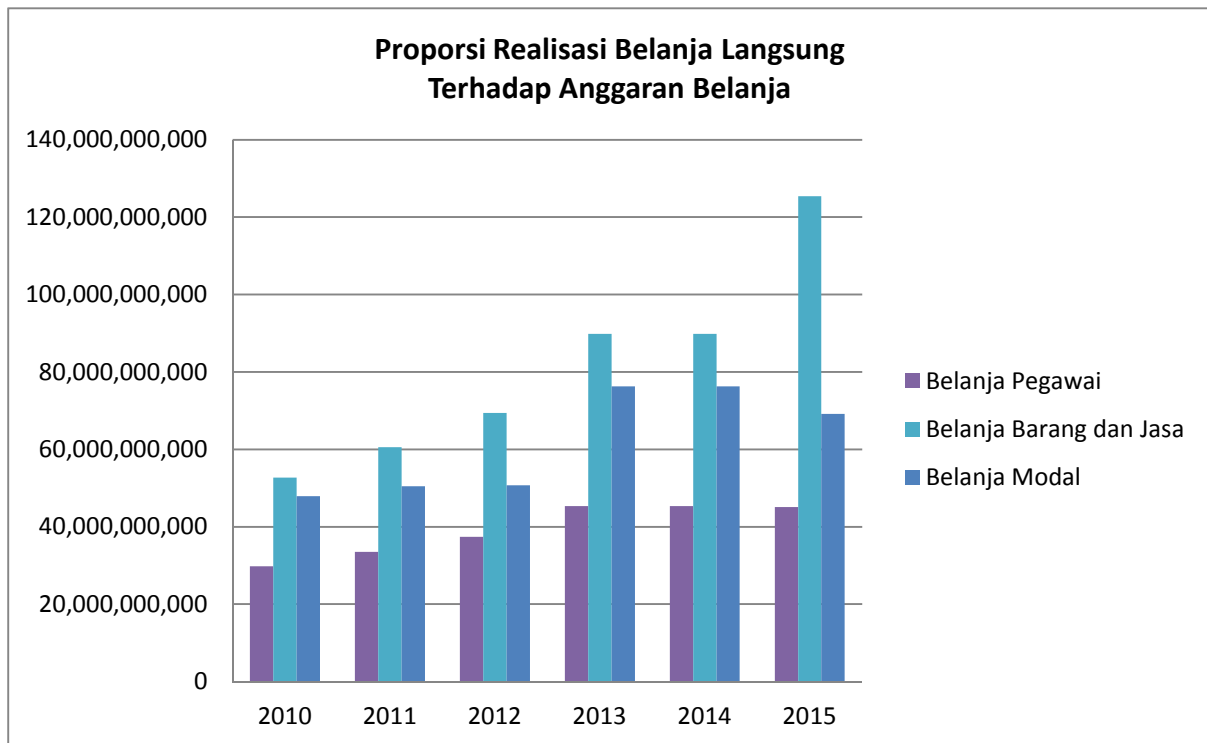
No	Uraian	2010 (% Distribusi)	2011 (% Distribusi)	2012 (% Distribusi)	2013 (% Distribusi)	2014 (% Distribusi)	2015 (% Distribusi)
A	Belanja Tidak Langsung	232.783.921.527	260.866.438.337.	289.830.843.899.	292.653.417.491.	323.711.738.644.	339.899.689.457.
1	Belanja Pegawai	209.549.305.264 (90,02%)	243.442.955.461. (93,32%)	270.874.433.012. (93,46%)	284.139.179.620. (97,08%)	301.399.665.287. (93,11%)	322.784.474.843. (94,94%)
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	8.897.878.673 (3,82%)	5.978.878.028. (2,29%)	15.749.150.310. (5,43%)	4.406.252.136. (1,51%)	18.619.220.084. (5,75%)	15.881.006.950. (4,68%)
5	Belanja Bantuan Sosial	13.328.869.690 (5,73%)	10.916.510.148. (4,18%)	1.968.440.000. (0,68%)	3.594.680.177. (1,23%)	3.249.026.000. (1%)	821.266.538. (0,24%)
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	551.521.298. (0,19%)	501.521.298. (0,17%)	443.827.273. (0,14%)	412.941.126. (0,12%)
8	Belanja Tidak Terduga	1.007.867.900 (0,43%)	528.094.700. (0,21%)	687.299.279. (0,24%)	11.784.260. (0,01%)	-	-

No	Uraian	2010 (% Distribusi)	2011 (% Distribusi)	2012 (% Distribusi)	2013 (% Distribusi)	2014 (% Distribusi)	2015 (% Distribusi)
B	Belanja Langsung	130.452.272.279	144.554.138.037.	157.611.909.658.	211.456.840.658.	218.530.943.293.	239.615.593.710.
1	Belanja Pegawai	29.824.976.178 (22,86%)	33.546.024.904. (23,21%)	37.427.444.376. (23,75%)	45.311.233.704. (21,43%)	45.311.233.704. (20,73%)	45.063.994.971. (18,82%)
2	Belanja Barang dan Jasa	52.709.480.286 (40,41%)	60.550.867.273. (41,89%)	69.449.826.690. (44,06%)	89.852.281.671. (42,49%)	89.852.281.671. (41,12%)	125.376.686.163. (52,42%)
3	Belanja Modal	47.917.815.815 (36,73%)	50.457.245.860. (34,90%)	50.734.638.592. (32,19%)	76.293.325.283. (36,08%)	76.293.325.283. (38,15%)	69.174.912.576. (28,76%)

GRAFIK 3.2.1



GRAFIK 3.2.2



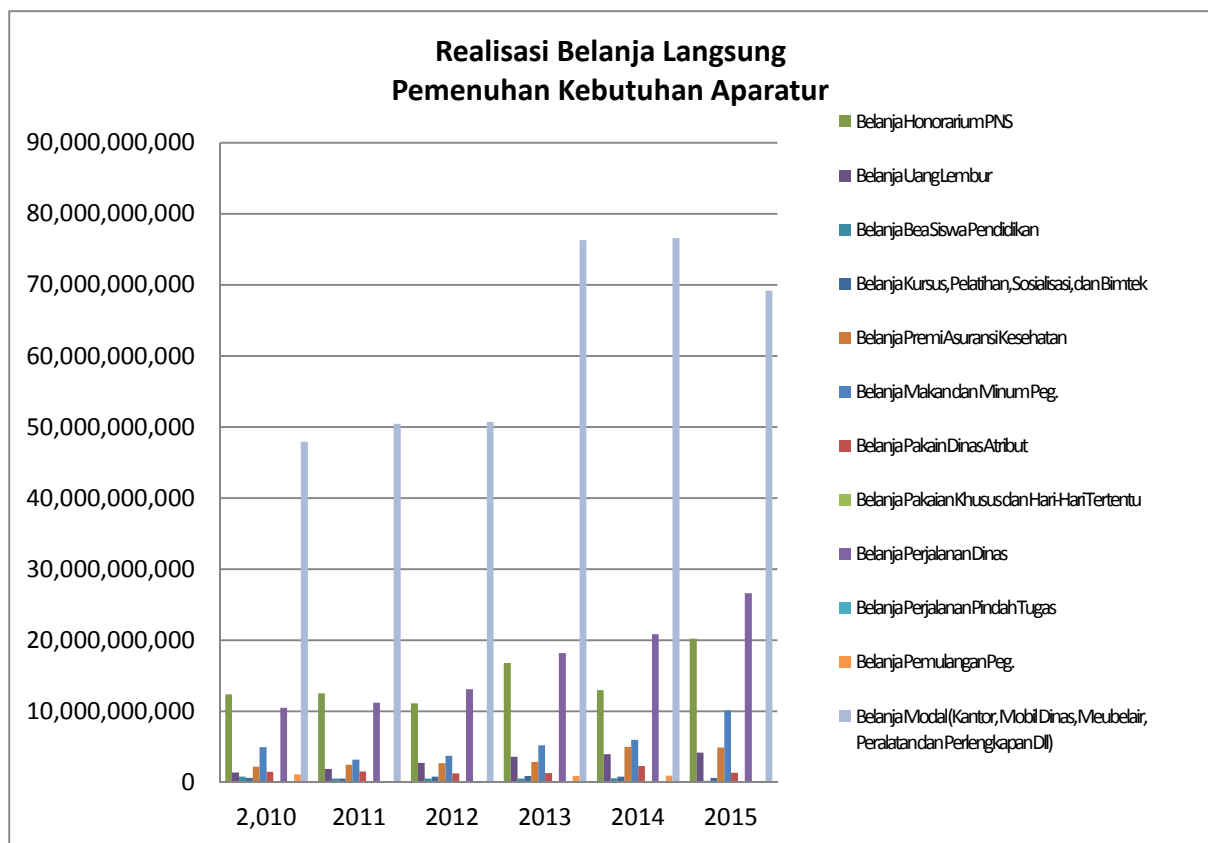
Dari tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa selama tahun 2010 - 2015 proporsi rata-rata penggunaan anggaran **Belanja Tidak Langsung** terhadap jumlah Anggaran Belanja sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dengan proporsi rata-rata 94,36%, belanja hibah sebesar 3,81%, belanja bantuan sosial sebesar 1,45%, belanja bantuan keuangan sebesar 0,15%, belanja tidak terduga sebesar 0,23%, sedangkan proporsi rata-rata **Belanja Langsung** terbesar digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 44,40% dan belanja Modal sebesar 34,01%, sedangkan belanja pegawai hanya 21,59%. Gambaran proporsi anggaran Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Bukittinggi selama tahun 2010 - 2015 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel.3.3
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bukittinggi

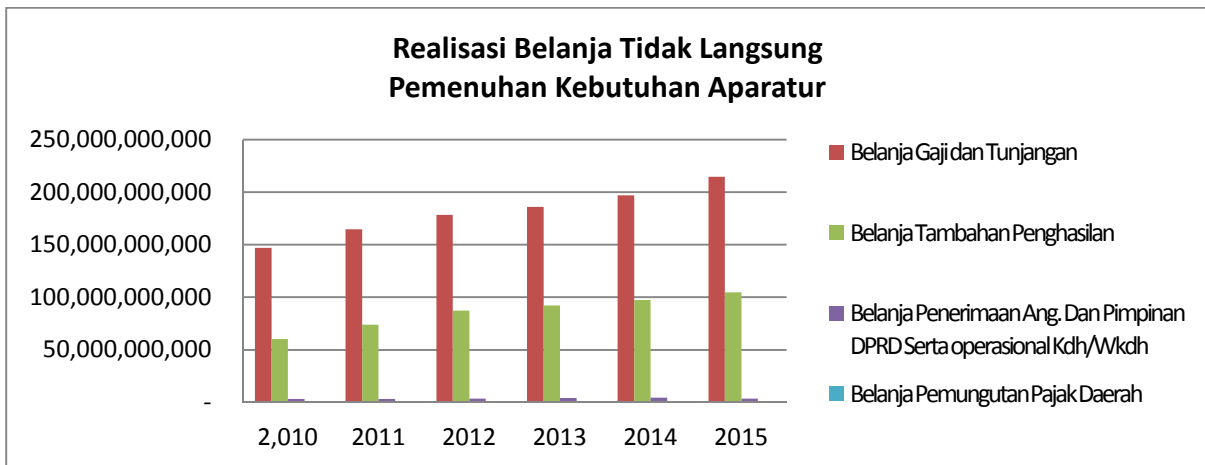
No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Belanja Tidak Langsung	210.599.184.116	242.666.447.174	270.191.741.190	283.326.771.150	299.838.901.630	324.221.452.977
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	147.046.237.783	164.771.618.464	178.215.649.652	185.985.440.660	197.064.506.190	214.692.593.464
2	Belanja Tambahan Penghasilan	60.176.956.874	73.958.452.529	87.459.426.900	92.175.563.098	97.270.638.979	104.580.877.282
3	Belanja Penerimaan Ang. Dan Pimpinan DPRD Serta operasional Kdh/Wkdh	3.199.452.752	3.332.439.992	3.649.736.471	4.199.132.184	4.405.669.919	3.689.180.780
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	176.536.707	603.936.189	866.928.167	966.635.208	1.098.086.542	1.258.801.451
B	Belanja Langsung	35.534.337.856	33.995.652.476	35.162.787.069	50.561.521.927	53.472.374.581	68.384.490.073
1	Belanja Honorarium PNS	12.403.606.403	12.510.184.050	11.136.296.069	16.789.032.864	12.964.456.206	20.229.771.900

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Belanja Uang Lembur	1.404.642.300	1.884.238.000.	2.734.034.000.	3.600.115.000.	3.979.190.750.	4.165.511.700
3	Belanja Bea Siswa Pendidikan	797.456.000	548.300.000.	535.893.000.	561.503.150.	584.210.365.	234.608.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek	627.893.475	520.036.135.	787.715.210	888.661.090	830.859.952.	642.728.505
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.217.984.830	2.489.712.000.	2.712.693.435.	2.872.919.450.	4.981.817.083.	4.909855.265
6	Belanja Makan dan Minum Peg.	4.956.029.522	3.207.082.092.	3.759.767.985.	5.214.657.399.	5.980.111.696.	10.140.300.301
7	Belanja Pakain Dinas Atribut	1.507.265.820	1.538.136.925.	256.207.000.	1.321.315.330.	2.276.571.360.	1.345.893.373
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.335.800	38.489.000.	35.329.800.	68.381.800.	78.000.000.	102.030.500
9	Belanja Perjalanan Dinas	10.476.123.706	11.197.635.624.	13.127.357.120	18.181.935.069.	20.850.842.969.	26.613.790.529
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Peg.	1.112.000.000	61.838.650.	77.493.450.	896.120.300.	946.314.200.	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan Dll)	47.917.815.815	50.457.245.860.	50.734.638.592.	76.293.325.283.	76.551.550.636.	69.174.912.576
	TOTAL	294.051.337.787	327.119.345.510.	356.089.166.851.	410.181.618.360.	429.862.826.847.	461.780.855.626

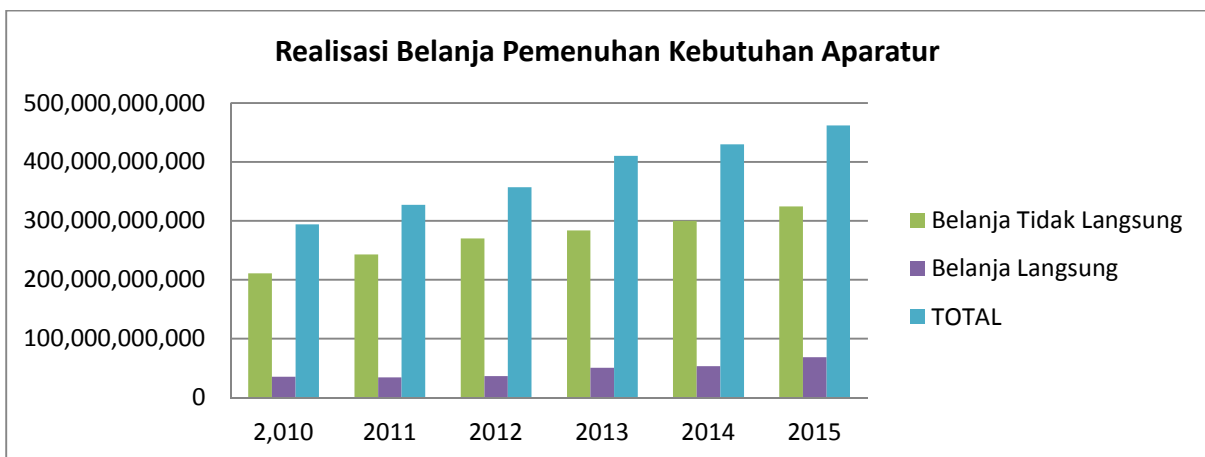
GRAFIK 3.3.1



GRAFIK 3.3.2



GRAFIK 3.3.3

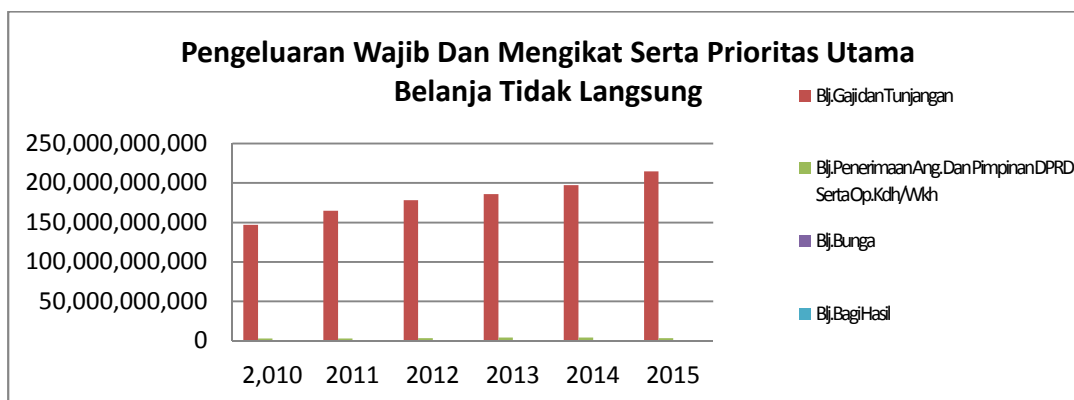


Dari tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terbesar bila dilihat dari sisi Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta belanja Tambahan Penghasilan. Sedangkan pada sisi Belanja Langsung dipergunakan untuk belanja honorarium PNS dan belanja perjalanan dinas, jika dilihat dari total pengeluaran belanja, maka pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama lima tahun terakhir tahun 2010 – 2015 secara berturut-turut sebesar ±Rp.327,715 milyar, ± Rp.356,017 milyar, ±Rp.410,794 milyar, dan ± Rp.430,270 milyar, dan ± Rp.460,565 milyar. Gambaran Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tabel berikut ini:

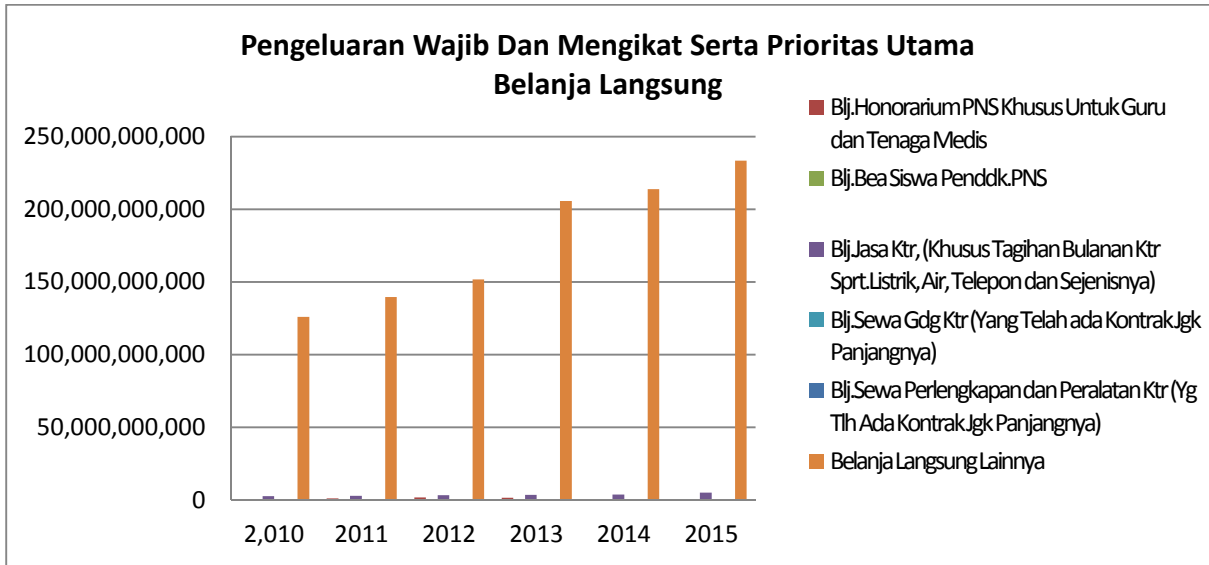
Tabel.3.4
Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
A	Blj.Tidak Langsung	232.783.921.527	260.866.438.337	289.830.843.899	292.653.417.491	323.711.738.644	339.899.689.457	7,21
1	Blj.Gaji dan Tunjangan	147.046.237.783	164.771.618.464	178.215.649.652.	185.985.440.660.	197.064.506.190.	214.692.593.464	7,27
2	Blj.Penerimaan Ang. Dan Pimpinan DPRD Serta Op.Kdh/Wkh	3.199.452.752	3.332.439.992	3.649.736.471	4.199.132.184	4.405.669.919	3.689.180.780.	8,54
3	Blj.Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4	Blj.Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Tidak Langsung Lainnya	82.538.230.992	92.762.379.881	107.965.457.776	102.468.844.647	122.049.295.571	121.517.915.213	7,83
B	Blj.Langsung	130.452.272.279	144.554.138.037	157.611.909.658	211.456.840.658	218.530.943.293	239.615.593.710	15,68
1	Blj.Honorarium PNS Khusus Untuk Guru dan Tenaga Medis	788.297.053	1.223.033.200.	1.887.828.469.	1.698.050.454.	393.625.000.	683.772.500.	10,81
2	Blj.Bea Siswa Penddk.PNS	797.456.000	548.300.000.	535.893.000.	561.503.150.	584.210.365.	234.608.000	5,57
3	Blj.Jasa Ktr, (Khusus Tagihan Bulanan Ktr Sprt.Listrik, Air, Telepon dan Sejenisnya)	2.847.863.435	3.047.381.427.	3.453.703.075.	3.558.018.243.	3.761.389.601.	5.178.107.918	15,63
4	Blj.Sewa Gdg Ktr (Yang Telah ada Kontrak Jgk Panjangnya)	-	-	-	-	-	-	-
5	Blj.Sewa Perlengkapan dan Peralatan Ktr (Yg Tlh Ada Kontrak Jgk Panjangnya)	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Langsung Lainnya	126.018.655.791	139.735.423.410	151.734.485.114	205.639.268.811	213.791.718.327	233.519.105.292	15,99
C	Pembiayaan Pengeluaran	20.000.000	2.311.546.513	2.370.000.000	18.932.000.000	29.583.000.000	23.883.000.000	20,27
1	Pembentukan Dana Cad.	-	-	-	15.000.000.000.	25.000.000.000.	15.000.000.000.	13,33
2	Pembyrn Pokok Utang	20.000.000	198.664.615.	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Pengeluaran Lainnya	-	2.112.881.898	2.370.000.000	3.932.000.000	4.583.000.000	8.883.000.000	47,06
	TOTAL (A+B+C)	363.256.193.806	407.732.122.887	449.812.753.557	523.042.258.149	571.699.414.973	603.398.283.167	11,87

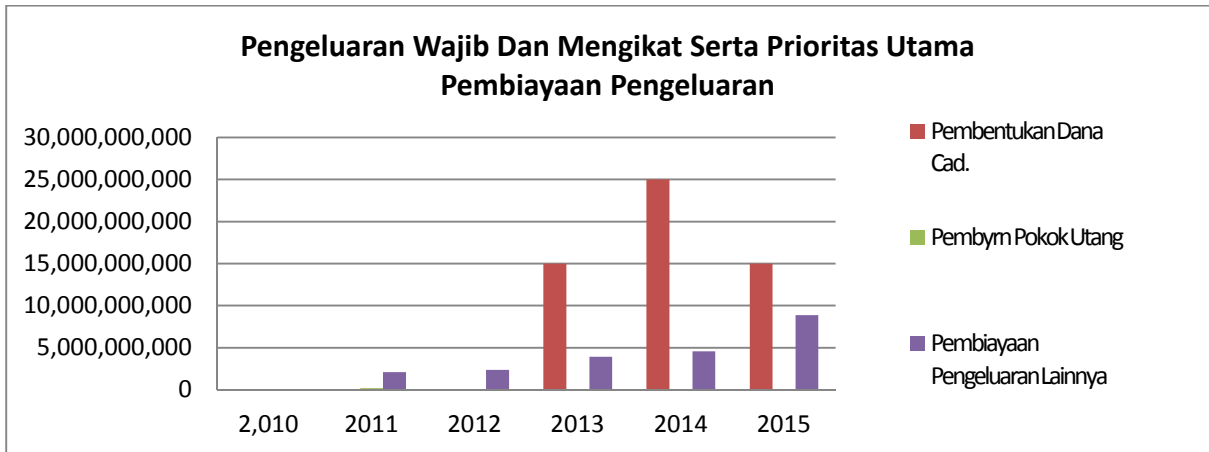
GRAFIK 3.4.1



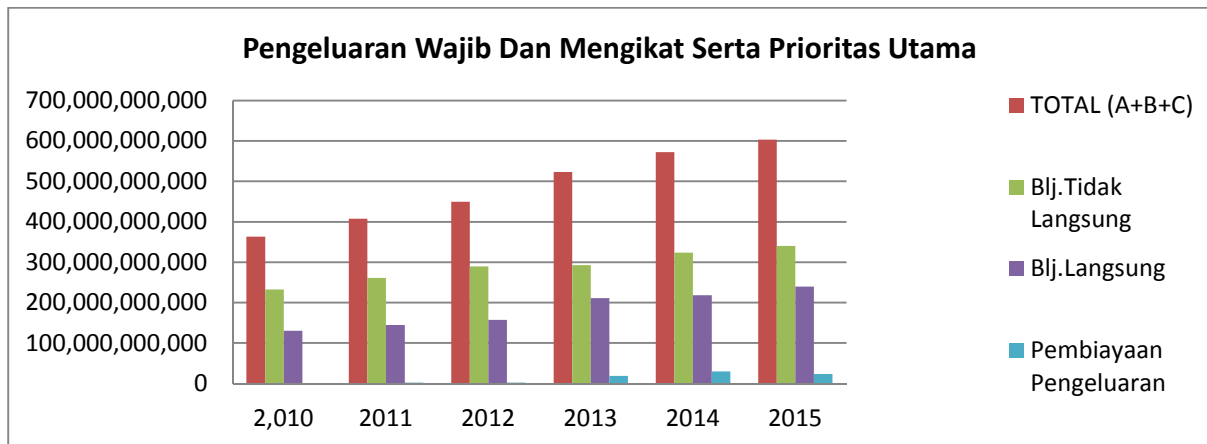
GRAFIK 3.4.2



GRAFIK 3.4.3



GRAFIK 3.4.4



Dari tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa belanja periodik yang wajib dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya pada **belanja langsung** adalah belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan Kantor seperti Listrik, Air, Telepon dan Sejenisnya), yang proporsi rata-rata pertumbuhannya pertahun sebesar 14,54 %, belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis rata-rata pertumbuhan sebesar 10,30% dan belanja beasiswa pendidikan PNS dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,41%, sedangkan untuk **belanja tidak langsung** adalah belanja gaji dan tunjangan yang proporsi rata-rata pertumbuhannya pertahun sebesar 6,85%, dan belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional Wako/Wawako dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,54%.

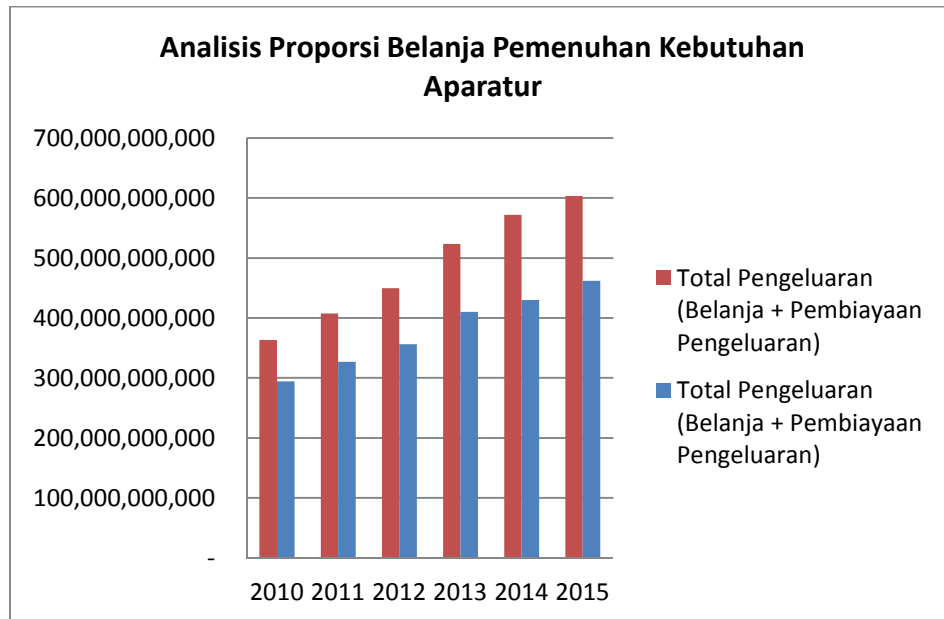
Dengan memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama sebagaimana tabel diatas, maka dapat diproyeksikan anggaran belanja selama 5 tahun kedepan (2016 -2021) untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan.

Tabel.3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2010	294.051.337.787	363.256.193.806	80,95
2	Tahun Anggaran 2011	327.119.345.510	407.732.122.887	80,23
3	Tahun Anggaran 2012	356.089.166.851	449.812.753.557	79,16
4	Tahun Anggaran 2013	410.181.618.360	523.042.258.149	78,42
5	Tahun Anggaran 2014	429.862.826.847	571.699.414.973	75,19

NO	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
6	Tahun Anggaran 2015	461.780.855.626	603.398.283.167	76,53

GRAFIK 3.5



Dari tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terbesar dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dengan pertumbuhan rata-rata selama tahun 2010-2015 adalah 6,85%. Sedangkan jika dilihat dari total pengeluaran belanja, maka pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2010 – 2015 secara berturut-turut sebesar 80,95%, 80,23%, 79,16%, 78,42%, 75,19%, dan 76,53%.

Belanja tidak langsung yang tidak wajib dan tidak mengikat yang terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, belanja bunga dan belanja tidak terduga, yang direncanakan digunakan untuk :

1. Belanja Hibah

Belanja Hibah dipergunakan untuk mendorong lembaga/badan/organisasi untuk berperan aktif dalam pembangunan. Belanja ini direncanakan akan diberikan secara hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat (5) tentang Pemerintahan Daerah, yang ada di Kota Bukittinggi antara lain :

- * Komisi Pemilihan Umum
- * Panitia Pengawas Pemilu

- * KONI Kota Bukittinggi;
- * Pramuka Kwarcab;
- * Palang Merah Indonesia;
- * Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- * Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD);
- * Badan Amil Zakat
- * Dewan Pendidikan Kota Bukittinggi;
- * Organisasi lainnya yang aktif di Kota Bukittinggi.

2. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial direncanakan untuk mendukung program-program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam upaya peningkatan kehidupan sosialmasyarakat, antara lain :

- * Belanja bantuan sosial kepada LSM dan Organisasi Masyarakat;
- * Santunan;
- * Bantuan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap baik Swasta, Non Dinas Pendidikan, maupun Negeri;
- * Bantuan kepada siswa yang tidak mampu baik untuk sekolah negeri maupun swasta
- * Bantuan bedah Rumah, dan Sarana prasana wilayah ;
- * Bantuan Penyandang Cacat, pemulangan orang terlantar dan korban bencana;
- * Bantuan operasional panti sosial dan panti asuhan, serta pendidikan non formal ;
- * dan bantuan lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja ini diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Bukittinggi serta kegiatan yang tidak biasa/tanggap darurat.

Untuk belanja langsung yang tidak wajib dan tidak mengikat digunakan untuk berbagai program/ kegiatan dengan tetap mengedepankan program/kegiatan prioritas.

Prioritas program/kegiatan tersebut dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Demikian selanjutnya Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan pendanaannya.

Program Prioritas I merupakan pembangunan daerah dengan Visi dan Misi atau program unggulan/ *dedicated* Kepala Daerah yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada periode lima tahun mendatang.

Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya serap yang tinggi pada capaian

visi dan misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah .

Program Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat **Perangkat Daerah** yang merupakan penjabaran per urusan yang berhubungan dengan program/kegiatan unggulan **Perangkat Daerah** yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi **Perangkat Daerah** termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Program Prioritas III merupakan program prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga.

3.1.1.3 Perkembangan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Target penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **369.371.306.722,-** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **369.371.306.722,-** atau **100** persen.

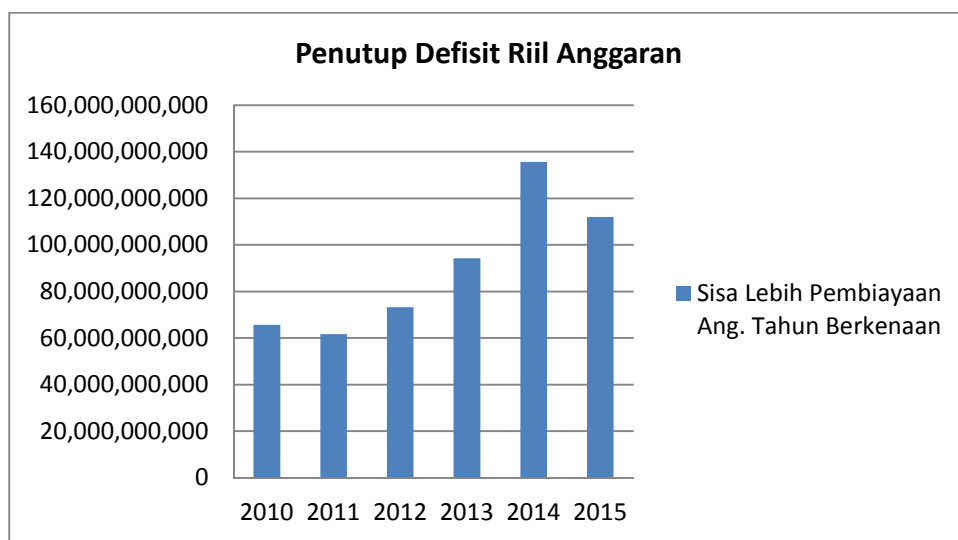
Gambaran Pembiayaan Riil Daerah selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel.3.6
Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan daerah	338.421.473.678	01.417.194.463	61.396.488.849	527.475.062.408	595.424.983.587	593.323.296.014
	Dikurangi Realisasi:						
2	Belanja Daerah	363.236.193.806	05.420.576.374	47.442.753.557	504.110.258.149	535.168.579.302	579.515.283.167
A	Defisit Riil	(24.814.720.128)	(4.003.381.911)	13.953.735.292	23.364.804.259	60.256.404.285	13.808.012.847
	Ditutup Oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
4	Sisa Lebih Perhitungan Ang. (SILPA) TA Sblmnya	90.459.676.600	65.622.525.392	59.307.566.800	70.892.029.222	75.324.136.518	98.224.027.131
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6	Hsl Penjln.Kekyan Daerah Yg	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
	Dipisahkan						
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	90.459.676.600	65.622.525.392	59.307.566.800	70.892.029.222	75.324.136.518	98.224.027.131
A_B	Sisa Lebih Pembiayaan Ang. Tahun Berkenaan	65.644.956.472	61.619.143.481	73.261.302.092	94.256.833.481	135.580.540.803	112.032.039.978

GRAFIK 3.6



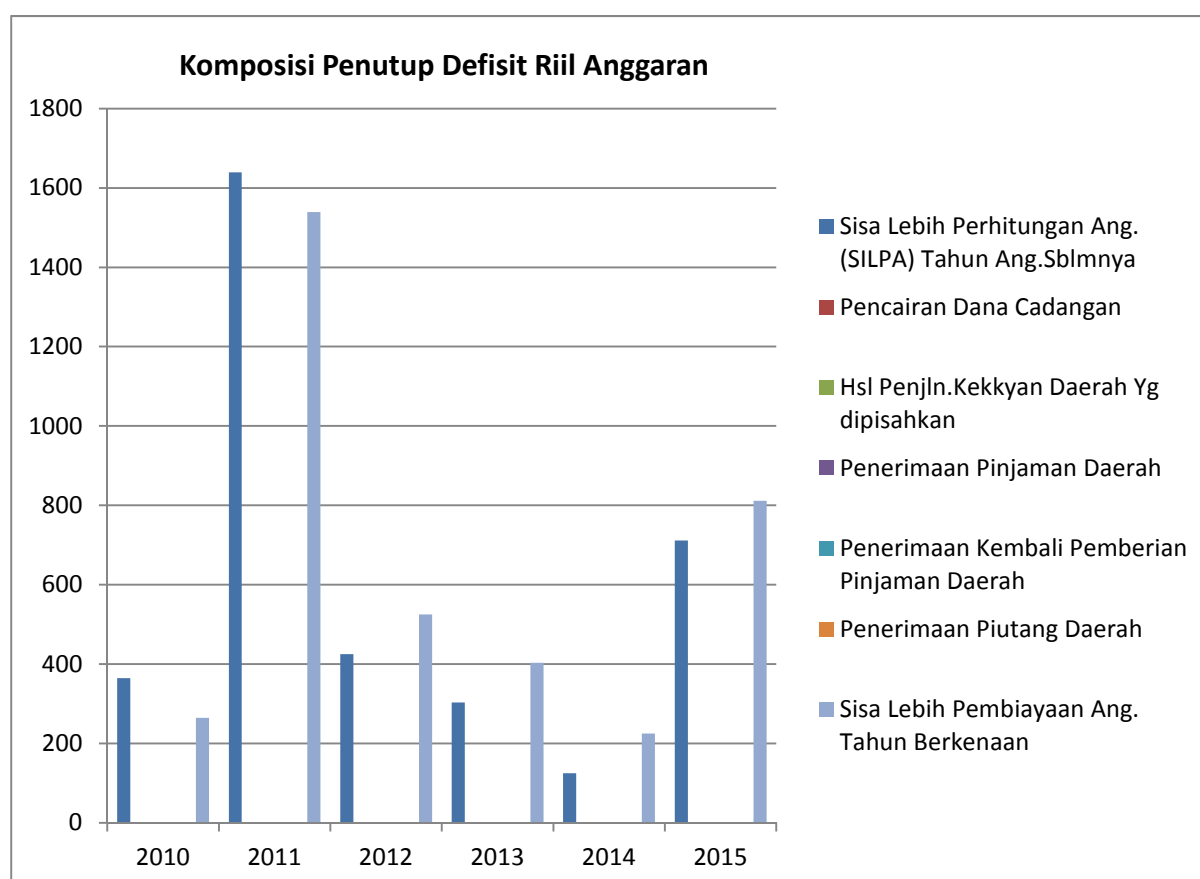
Pada tabel dan grafik penutup defisit riil diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 dan 2011 Belanja Daerah lebih besar dari pada realisasi pendapatan, yang berarti terjadi defisit anggaran, sehingga diperlukan anggaran penutup defisit riil pada tahun 2010 dan 2011, oleh karena itu SiLPA tahun sebelumnya dialokasikan guna menutup defisit, dan akan mengurangi SiLPA tahun berkenaan yang selanjutnya akan menjadi bagian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, serta tahun 2015 terjadi kondisi yang Surplus Anggaran. Gambaran komposisi penutup defisit anggaran seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel.3.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit					
		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Ang. (SILPA) Tahun Ang.Sblmnya	364,55	1.639,18	425,03	303,41	125,01	711,36
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hsl Penjln.Kekkyan Daerah Yg dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Ang. Tahun Berkenaan	264,54	1.539,18	525,03	403,41	225,01	811,36

GRAFIK 3.7

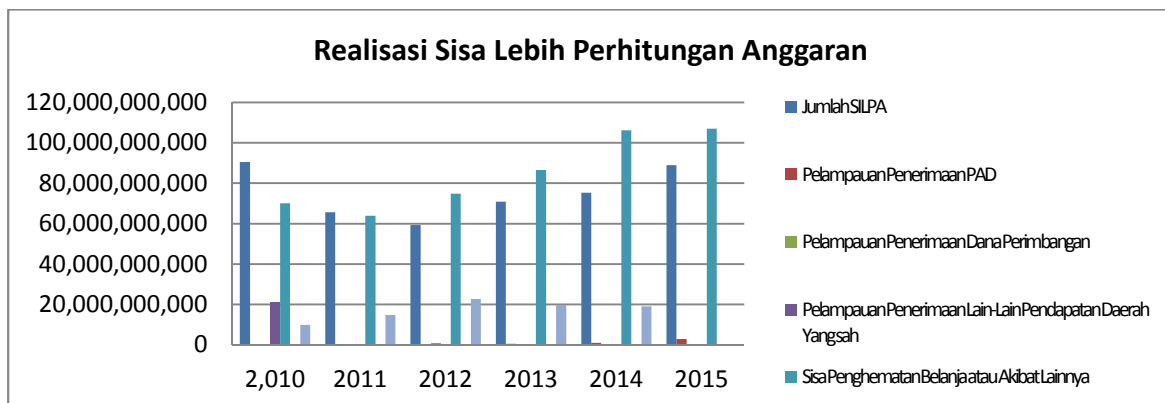


Pada tabel dan grafik penutup defisit riil diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 Realisasi Belanja Daerah masih dibawah (lebih kecil) dari pada realisasi pendapatan, yang berarti tidak terjadi defisit anggaran atau surplus sebesar Rp.13.953.735.292,- sehingga tidak diperlukan anggaran penutup defisit riil pada tahun 2012, oleh karena itu SiLPA tahun sebelumnya (tahun 2011) tidak dialokasikan guna menutup defisit melainkan dialokasi sepenuhnya sebagaipenerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan (tahun 2012) dan akan menambah SiLPA tahun berkenaan (tahun 2012) yang selanjutnya akan menjadi bagian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada tahun anggaran 2013. Demikian pula untuk tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 terjadi kondisi yang sama yaitu Surplus Anggaran. Gambaran komposisi penutup defisit anggaran seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel.3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010		2011		2012		2013		2014		2015		Rata - Rata Pertumbuhan
		Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	
1	Jumlah SILPA	90.459.676.600		65.622.525.392		59.307.566.800		70.892.029.222		75.324.136.518		88.868.356.913		6,70
2	Pelampauan Penerimaan PAD	0		0	0	0	0	557.235.655	0,79	1.035.383.121	1,37	2.937.693.604	2,99	134,77
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0		0	0	856.907.495	1,44	0	0	0	0	0		-
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah	21.371.218.178	23,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	70.004.789.127	77,39	63.832.777.833	97,27	74.761.072.571	126,06	86.545.886.582	122,08	106.104.043.829	131,73	106.981.811.167		11,89
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir tahun belum terselesaikan	202.935.093	0,22	20.199.919	0,03	727.131	0,001	5.051.841	0,001	-	0	9.405.856	0,001	116,91
7	Kegiatan lanjutan	9.971.996.830	11,02	14.780.228.400	22,56	22.700.042.400	38,28	19.786.332.540	27,93	19.124.307.540	25,37	290.281.915	0,29	19,35

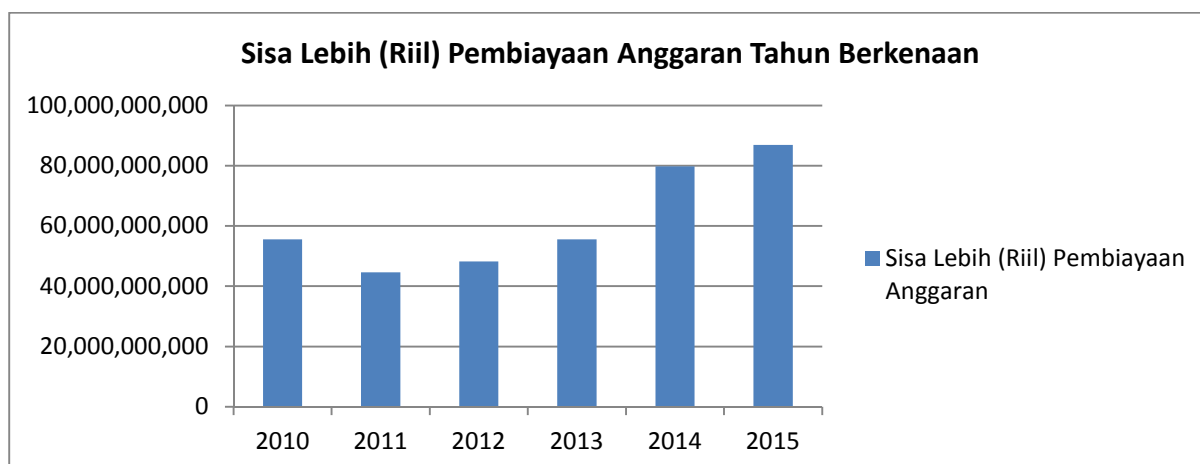
GRAFIK 3.8



Tabel.3.9
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Tingkat Pertumbuhan
1	Saldo Kas Neraca Daerah	65.695.717.990	59.393.818.252	70.940.237.555	75.329.687.713	98.942.864.066	88.448.727.749	8,12
	Dikurangi:							
2	Kewajiban Kpd Pihak Ketiga S.d Akhir Tahun Blm terselesaikan	202.935.093	20.199.919	727.131	5.051.841	-	9.405.856	116.91
3	Kegiatan Lanjutan	9.971.996.830	14.780.228.400	22.700.042.400	19.786.332.540	19.124.307.540	290.281.915	(12,23)
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	55.520.786.067	44.593.389.933	48.239.468.024	55.538.303.332	79.818.556.526	88.149.039.978	14,81

GRAFIK 3.9

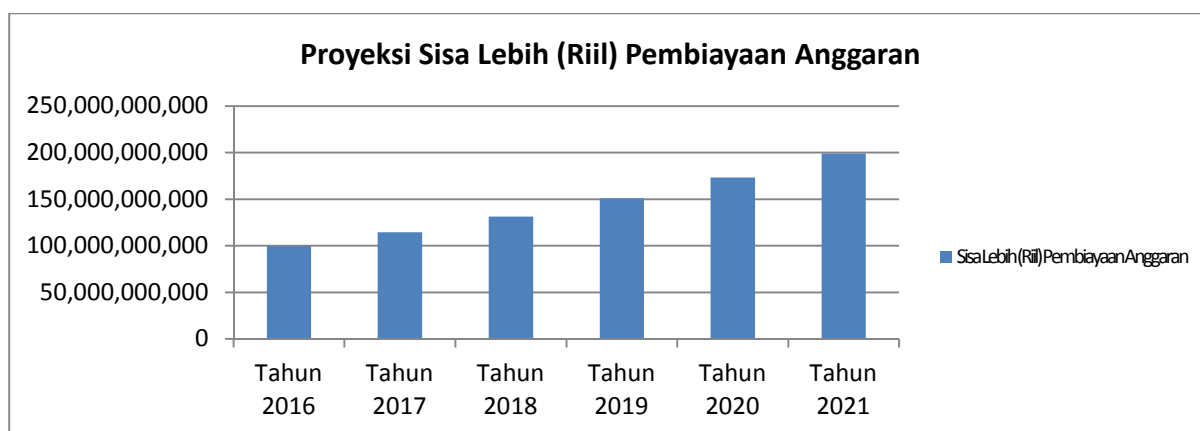


Berdasarkan gambaran sisa lebih riil perhitungan pembiayaan anggaran tahun berkenaan, maka dapat dihitung proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021), sebagaimana tabel berikut:

Tabel.3.10
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tgkt Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Saldo Kas Neraca Daerah	88.448.727.749	8,12	95.630.764.442	103.395.982.514	111.791.736.294	120.869.225.281	130.683.806.373	141.295.331.450
	Dikurangi:								
1	Kewajiban Kpd Pihak Ketiga S.d Akhir Tahun Belum terselesaikan	9.405.856	116,91	20.402.242	44.254.503	95.992.443	208.217.210	451.643.950	979.660.892
2	Kegiatan Lanjutan	290.281.915	(12,23)	254.780.436	223.620.789	196.271.966	172.267.905	151.199.540	132.707.836
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	88.149.039.978	14,81	101.203.912.798	116.192.212.283	133.400.278.922	153.156.860.230	175.839.391.230	201.881.205.071

GRAFIK 3.10



Berdasarkan proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran sebagaimana terlihat pada tabel diatas, saldo kas neraca terjadi pertumbuhan sebesar 18,99% dengan proyeksi untuk lima tahun kedepan sebagaimana terlihat pada tabel diatas, untuk kewajiban kepada pihak ketiga s.d akhir tahun belum terselesaikan terjadi fluktuasi, tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi penurunan, sementara itu pada tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi kenaikan, dan tahun 2014 tidak ada kewajiban kepada pihak ketiga dan tahun 2015 terjadi lagi kenaikan, sehingga secara rata-rata terjadi pertumbuhan 116,91% ([lihat Tabel.3.9](#)), sementara itu untuk kegiatan lanjutan terjadi penurunan rata-rata sebesar (12,23%), tidak ada pertumbuhan, hanya pada tahun 2012 terjadi kenaikan, sementara untuk tahun 2013, 2014, dan 2015 terjadi penurunan, sementara itu sisa lebih riil pembiayaan anggaran terjadi pertumbuhan 19,35% dengan proyeksi untuk lima tahun kedepan sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

3.1.2. Neraca Daerah

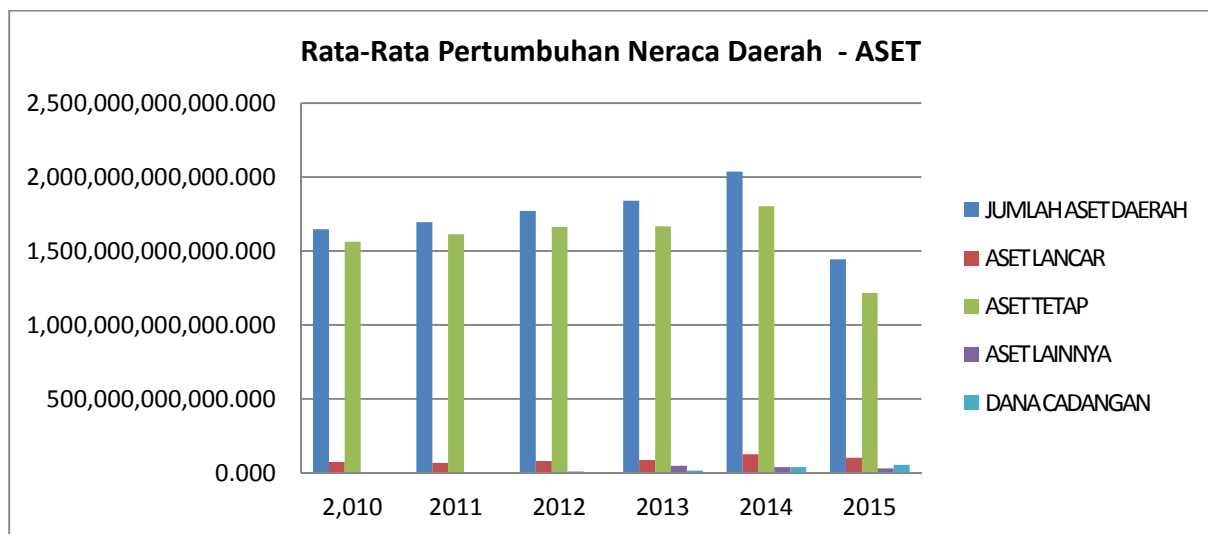
Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama Neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2011-2015 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.3.11
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kota Bukittinggi

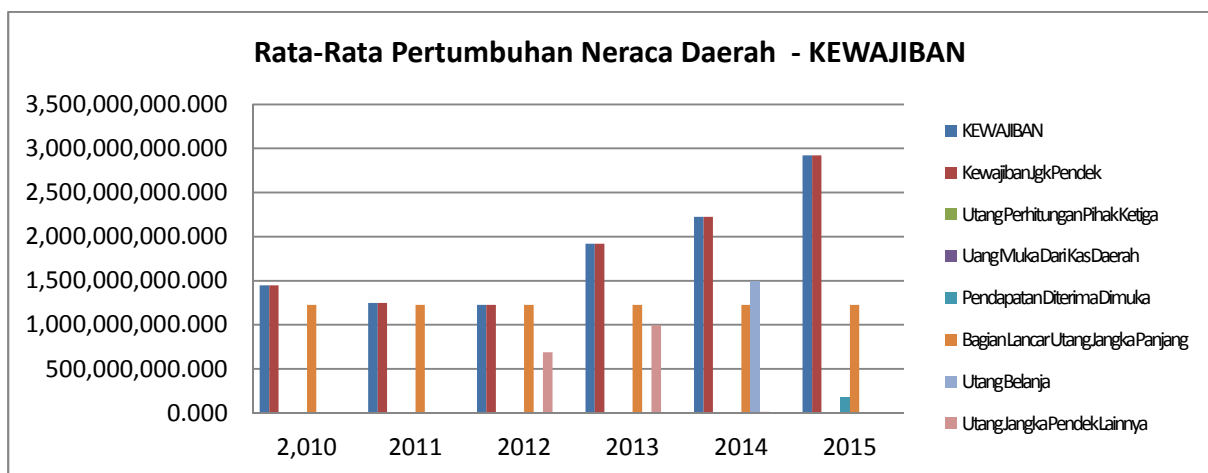
No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata- Rata Pertum- buan (%)
1.	ASET	1.647.080.468.131	1.693.863.731.064.	1.770.303.733.783.	1.839.142.768.365.	2.035.683.171.614.	1.443.534.285.031.	(5,82)
1.1	ASET LANCAR	73.925.032.590	67.972.610.254.	81.813.582.303.	87.064.814.661.	125.893.872.600.	103.480.554.692.	8,03
1.1.1	Kas	65.582.909.596	59.393.818.252.	70.940.237.555.	75.329.687.713.	98.942.864.066.	88.488.727.749	8,12
1.1.2	Piutang	4.114.864.294	4.151.565.531.	5.424.939.245.	6.290.844.354.	19.904.482.562.	9.755.358.070	6,43
1.1.3	Persediaan	4.114.450.305	4.427.226.470.	5.448.405.503.	5.444.282.593.	6.048.985.639.	5.236.468.873.	3,29
	Investasi Jgk Pendek	-	-	-	-	-	-	-
	Investasi Jgk Panjang	7.413.118.102	9.238.677.065.	18.073.784.806.	22.113.627.441.	26.511.210.495.	35.660.268.277.	43,37
1.2	ASET TETAP	1.563.223.985.583	1.613.167.884.525.	1.661.077.718.836.	1.666.428.687.903.	1.803.735.892.058.	1.216.951.312.750.	(9,37)
1.2.1	Tanah	518.029.956.300	517.774.373.300.	518.377.133.300.	457.780.109.582.	508.370.855.477.	510.559.945.477.	0,03
1.2.2	Peralatan dan Mesin	105.562.406.148	117.356.451.466.	130.962.613.948.	146.372.364.787.	163.735.157.071.	182.629.812.609..	10,47
1.2.3	Gedung dan Bangunan	588.817.432.761	599.438.880.063.	609.286.262.225.	623.008.436.418.	673.969.357.697.	701.876.690.710.	3,84
1.2.4	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	328.168.526.179	352.107.458.329.	367.775.308.299.	393.279.388.827.	414.098.020.595.	432.796.508.953.	5,30
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	12.673.667.365	15.754.965.303.	16.643.639.568.	18.293.698.980.	22.746.507.886.	20.021.649.448.	5,08
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.971.996.830	18.032.761.496.	18.032.761.496.	27.694.689.307.	20.815.993.332.	29.972.037.727.	18,30
1.3	ASET LAINNYA	2.518.331.856	3.484.559.220.	9.338.647.837.	48.530.175.561.	39.369.424.437.	31.864.160.227.	24,16
1.4	DANA CADANGAN	-	-	-	15.000.410.958.	40.172.772.023.	55.577.989.083.	51,58
	JUMLAH ASET DAERAH	1.647.080.468.131	1.693.863.731.064.	1.770.303.733.783.	1.839.142.768.365.	2.035.683.171.614.	1.443.534.285.031.	(5,82)
2	KEWAJIBAN	1.447.002.702	1.248.822.328	1.225.399.540	1.919.725.104.	2.222.792.157.	2.919.583.554.	17,95
2.1	Kewajiban Jgk Pendek	1.447.002.702	1.248.822.328.	1.225.399.540.	1.919.725.104.	2.222.792.157.	2.919.583.554.	17,95
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	202.935.093	20.199.919	727.131	5.051.841	-	9.405.856.	172,79
2.1.2	Uang Muka Dari Kas Daerah	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	177.078.719.	-
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.224.672.409	1.224.672.409	1.224.672.409	1.224.672.409	1.224.672.409	1.224.672.409	-
2.1.5	Utang Belanja	-	-	-	-	-	1.496.416.602	-
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	19.395.200	3.950.000	-	688.409.414	998.119.748	12.009.968.	(2,045,1)
2.1.7	Utang Pajak	-	-	-	1.591.440	-	-	-
2.2	Kewajiban Jgk Panjang	-	-	-	-	-	-	-
3	EKUITAS DANA	1.645.633.465.429	1.692.614.908.736.	1.769.078.334.243.	1.837.217.991.420.	2.033.460.379.457.	1.440.614.701.477	(5,87)
3.1	Ekuitas Dana Lancar	72.478.029.888	67.952.410.335.	81.812.855.172.	87.058.171.380.	123.671.080.443.	-	17,24
3.1.1	SILPA	65.670.700.925	59.355.742.333.	70.939.477.624.	75.323.044.432.	98.943.344.066.	-	14,27
3.1.2	Cadangan Piutang	4.114.864.294	4.151.565.531.	5.424.939.245.	6.290.844.354.	19.904.482.562.	-	65,68
3.1.3	Cadangan Persediaan	4.114.450.305	4.427.226.470.	5.448.405.503.	5.444.282.593.	6.048.985.639.	-	9,01
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	1.573.155.435.541	1.625.891.120.810.	1.688.490.151.479.	1.737.072.490.905.	1.869.616.526.991.	-	3,60
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.563.223.985.583	1.613.167.884.525.	1.661.077.718.836.	1.666.428.687.903.	1.803.735.892.058.	-	2,87

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata- Rata Pert umb uhan (%)
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	2.518.331.856	3.484.559.220.	9.338.647.837.	48.530.175.561.	39.369.424.437.	-	142,21
3.2.3	Diinvestasikan Dalam Investasi Jgk Panjang	7.413.118.102	9.238.677.065.	18.073.784.806.	22.113.627.441.	26.511.210.495.	-	34,47
	Ekuitas Dana Cadangan		-	-	15.000.410.958	40.172.772.023	-	42
	Ekuitas Dana Untuk Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.647.080.468.131	1.693.863.731.064.	1.770.303.733.783.	1.839.142.768.365	2.035.683.171.614.	1.443.534.285.031.	(5,82)

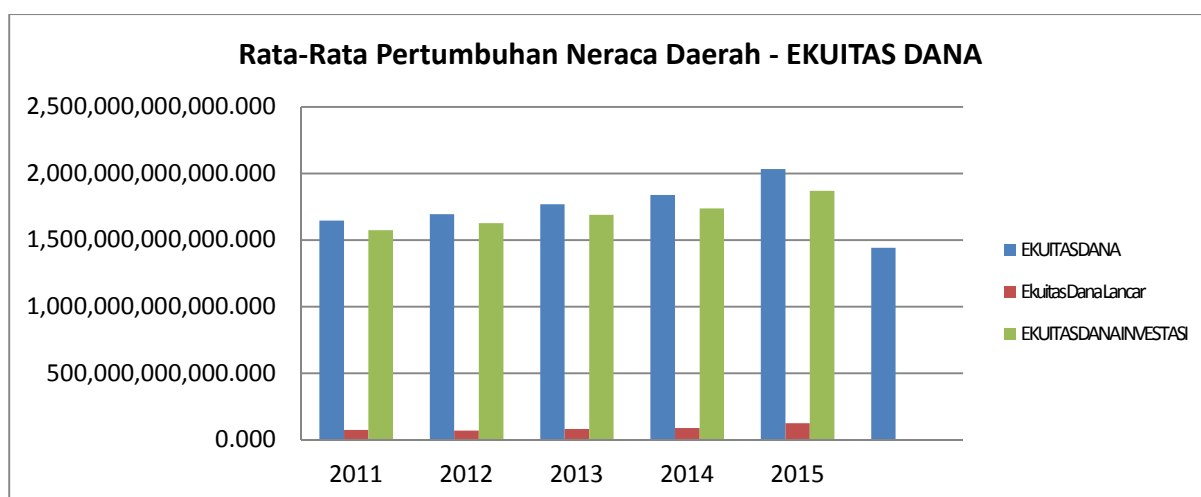
GRAFIK 3.11.1



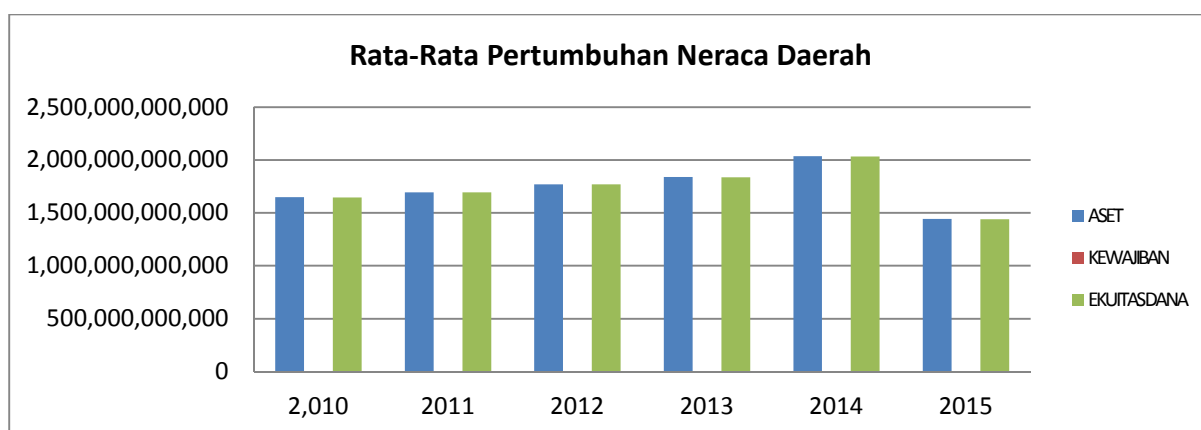
GRAFIK 3.11.2



GRAFIK 3.11.3



GRAFIK 3.11.4



Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada tahun 2010, Kota Bukittinggi memiliki aset senilai Rp. 1,647 trilyun, walaupun pada tahun 2010 sampai tahun 2014 terjadi kenaikan nilai aset, namun pada tahun 2015 nilai aset terjadi penurunan, sehingga secara rata-rata terjadi penurunan nilai aset sekitar 1,82%. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2010 mencapai Rp.1.563 trilyun. Aset tetap ini meliputi 95,27 persen dari seluruh aset Pemerintah Kota Bukittinggi.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah

daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1,447 milyar. Dari tahun 2010 hingga tahun 2015 jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2012 dan tertinggi tahun 2015. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Bukittinggi Tahun 2010 mencapai Rp. 1,645 trilyun, dan mengalami pertumbuhan dari 2010-2014, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan, sehingga secara rata-rata terjadi penurunan ekuitas sebesar 5,87 persen.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. **Rasio solvabilitas** adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan **Rasio kewajiban terhadap ekuitas** adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

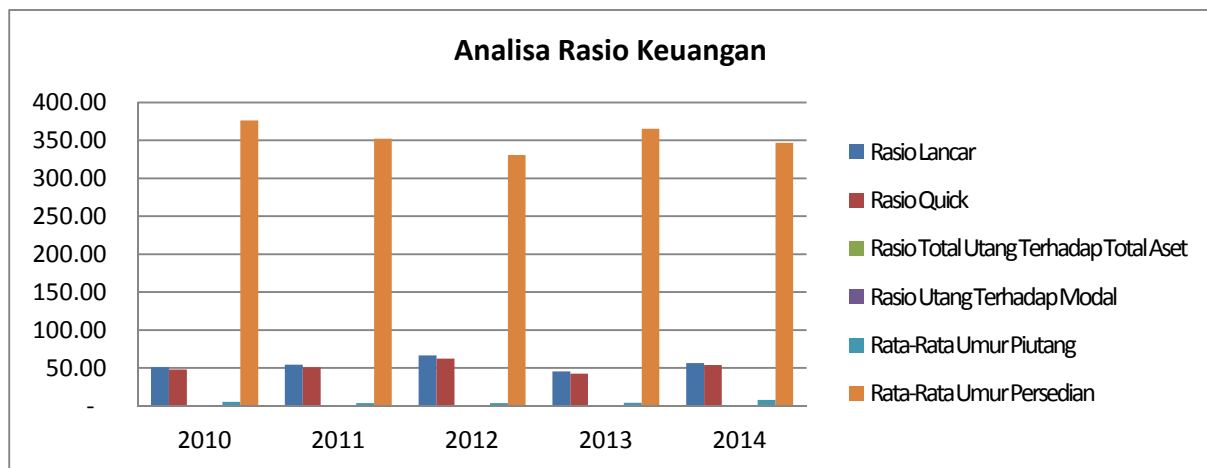
Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Bukittinggi setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel.3.12
Analisa Rasio Keuangan
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Rasio Lancar	51,09	54,42	66,76	45,35	56,64	35,44
2	Rasio Quick	48,25	50,88	62,32	42,52	53,92	33,65
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Aset	0,09	0,07	0,07	0,10	0,11	0,20
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,09	0,07	0,07	0,10	0,11	0,20
5	Rata-Rata Umur Piutang	5,59	3,76	3,79	4,05	8,03	9,53
6	Rata-Rata Umur Persediaan	376,09	352,11	330,80	365,15	346,76	392,47

GRAFIK 3.12



Current ratio dan quick ratio atas keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik.

Ratio aktivitas adalah untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas Pemerintah daerah dalam menggunakan dananya secara efektif dan efisien. Ratio ini dapat mengukur efisiensi kegiatan operasional birokrasi Pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada waktu periode tertentu. Untuk Neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang adalah 365 hari

dibagi dengan perputaran piutang, perputaran piutang tersebut diperoleh dari Pendapatan Daerah dibagi dengan Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah, sedangkan Rata-Rata Piutang Pendapatan Daerah diperoleh dari Saldo Awal Piutang Ditambah dengan Saldo Akhir Piutang dibagi 2 (dua), sedangkan rasio rata-rata umur persediaan adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan, perputaran persediaan tersebut diperoleh dari Nilai Persediaan Yang Digunakan Dalam Satu Tahun dibagi dengan Rata-Rata Nilai Persediaan, sedangkan Rata-Rata Nilai Persediaan diperoleh dari Saldo Awal Persediaan ditambah Saldo Akhir Persediaan dibagi 2 (dua).

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2010-2015 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2010-2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Selama Periode Tahun Anggaran 2010-2015, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah.

Terkait dengan kebijakan Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut diatas, diperlukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan PAD, sehingga tingkat ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat tidak terlalu besar, antara lain dengan melakukan;

1. Melakukan analisis potensi rill penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pengelolaan sumber daya daerah secara lebih profesional melalui peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
3. Intensifikasi PAD melalui penyesuaian tarif pajak dan tertribusi.
4. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Peningkatan kebijakan PAD yang berasal dari pajak daerah, khususnya pajak hotel, restoran, penerangan jalan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB.
6. Pembenahan sistem retribusi perparkiran, pelayanan pasar, penyediaan dan penyedotan kakus dan persampahan.
7. Peningkatan NJOP yang berkaitan dengan BPHTB dan PBB.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2010-2015, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2010-2015 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain :

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan.
3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan Kelompok UKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur.
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM).
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **Perangkat Daerah**
7. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

8. Langkah-Langkah strategis dan target yang terukur untuk meningkatkan realisasi belanja langsung dimasa mendatang, sebagai berikut;

- a) Program dan Kegiatan yang diajukan oleh **Perangkat Daerah** harus jelas output dan outcomenya.
- b) Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari DAK harus jelas Juklak dan Juknisnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Penganggaran belanja modal yang merupakan salah satu komponen belanja langsung penganggarnya harus jelas dan mengacu kepada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- d) **Perangkat Daerah** dalam mengajukan program dan kegiatan harus mengutamakan program yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

9. Merumuskan kebijakan yang strategis dan konkrit untuk menekan belanja kebutuhan aparatur, sebagai berikut;

- a) Melakukan rasionalisasi terhadap belanja kebutuhan aparatur, khususnya kebutuhan aparatur yang ada pada belanja langsung seperti perjalanan dinas, honorarium, uang lembur dan belanja makan minum rapat/diklat/pertemuan.
- b) Melakukan rasionalisasi terhadap belanja kebutuhan aparatur, khususnya kebutuhan aparatur yang ada pada belanja tidak langsung seperti belanja tambahan penghasilan pegawai, merampingkan jabatan struktural dan jabatan fungsional serta mengurangi jumlah pegawai.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Penganggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang besaran angkanya diperkirakan sewaktu melakukan pembahasan anggaran tahun yang akan datang atau besaran angkanya yang pasti diperoleh setelah dilakukan audit oleh BPK, sementara itu Pengeluaran pembiayaan bersumber dari Pembentukan dana cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Secara umum Silpa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menutupi defisit setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam rangka melaksanakan proses perencanaan pembangunan, dengan arti kata Silpa tahun sebelumnya direncanakan untuk mengerjakan pembangunan pada tahun berikutnya.

Setiap tahunnya Pemerintah Kota Bukittinggi terjadi kenaikan Silpa yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan

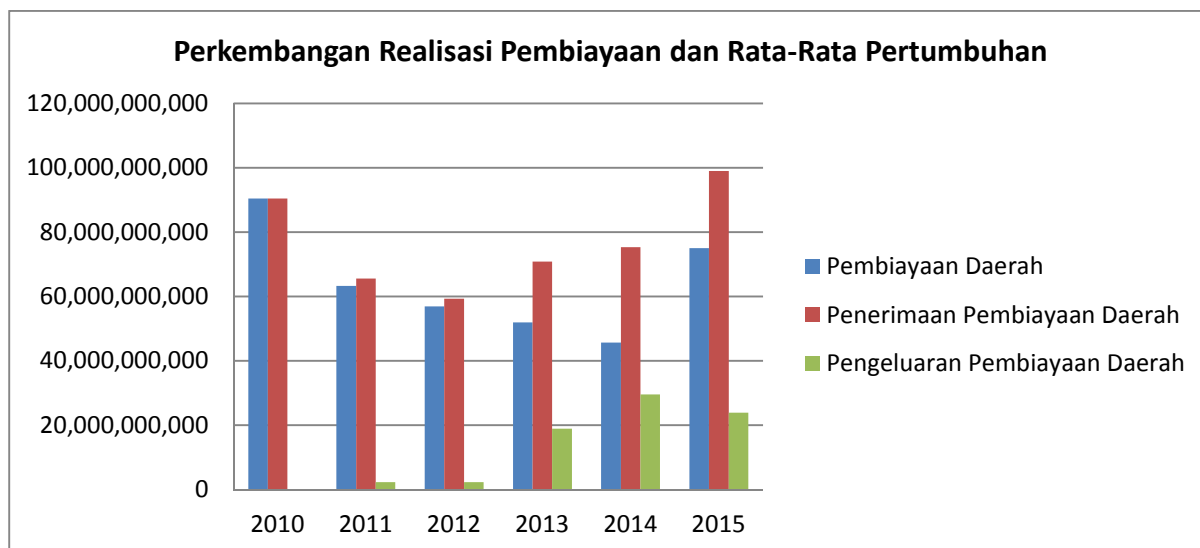
pada setiap **Perangkat Daerah** serta kurang akuratnya dalam perhitungan belanja, baik pada belanja tidak langsung maupun pada belanja langsung.

Berikut pada tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan realisasi pembiayaan dan rata-rata pertumbuhan Kota Bukittinggi dari tahun 2010 sampai tahun 2015, yang cenderung naik setelah dilakukan audit oleh BPK.

Tabel.3.13
Perkembangan Realisasi Pembiayaan dan Rata-Rata Pertumbuhan
Kota Bukittinggi

NO	URAIAN	TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Pembiayaan Daerah	90.438.297.347	63.310.978.879	56.937.566.800	51.960.029.222	45.741.136.518	74.341.027.131	-
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	90.458.297.347	65.622.525.392	59.307.566.800	70.892.029.222	75.324.136.518	98.224.027.131	8,86
1	Silpa Tahun Sebelumnya	90.458.297.347	65.622.525.392	59.307.566.800	70.892.029.222	75.324.136.518	98.224.027.131	8,86
2	Hasil Pengl.Kekay.	-	-	-	-	-	-	-
3	Daerah Yg Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000.000	2.311.546.513	2.370.000.000	18.932.000.000	29.583.000.000	23.883.000.000	25,52
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	15.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000	13,33
2	Penyertaan Modal	-	2.112.881.898	2.370.000.000	3.932.000.000	4.583.000.000	8.883.000.000	28,30
3	Pembayaran Pokok Hutang	20.000.000	198.664.615	-	-	-	-	-

GRAFIK 3.13



Dari tabel dan grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa Silpa tahun sebelumnya cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 8,86%, begitu juga dengan penyertaan modal yang cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 28,30%. Selisih dari Penerimaan

pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan akan diperoleh Pembiayaan Daerah yang dapat digunakan untuk mengerjakan pembangunan di Kota Bukittinggi.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

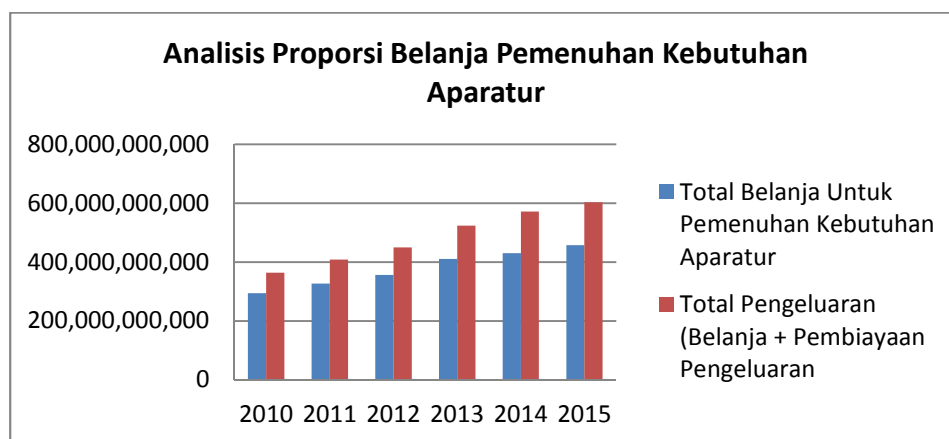
Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung menurun. Pada tahun 2010, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 80,95 persen, menurun menjadi 80,23 persen tahun 2011, dan menurun lagi menjadi 79,16 persen pada tahun 2012, 78,42 persen pada tahun 2013, 75,19 persen pada tahun 2014, dan di tahun 2015 naik menjadi 76,53 persen, lihat (Tabel.3.14). Kondisi ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kota Bukittinggi masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kota Bukittinggi digunakan untuk belanja pegawai. Perlu dipahami bahwa belanja pegawai sebagian besar untuk belanja aparatur bidang pendidikan dan kesehatan.

Tabel.3.14

**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bukittinggi**

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2010	294.051.337.787	363.256.193.806	80,95
2	Tahun Anggaran 2011	327.119.345.510.	407.732.122.887	80,23
3	Tahun Anggaran 2012	356.089.166.851.	449.812.753.557	79,16
4	Tahun Anggaran 2013	410.181.618.360.	523.042.258.149	78,42
5	Tahun Anggaran 2014	429.862.826.847.	571.699.414.973	75,19
6	Tahun Anggaran 2015	461.780.855.626	603.398.283.167	76,53

GRAFIK 3.14

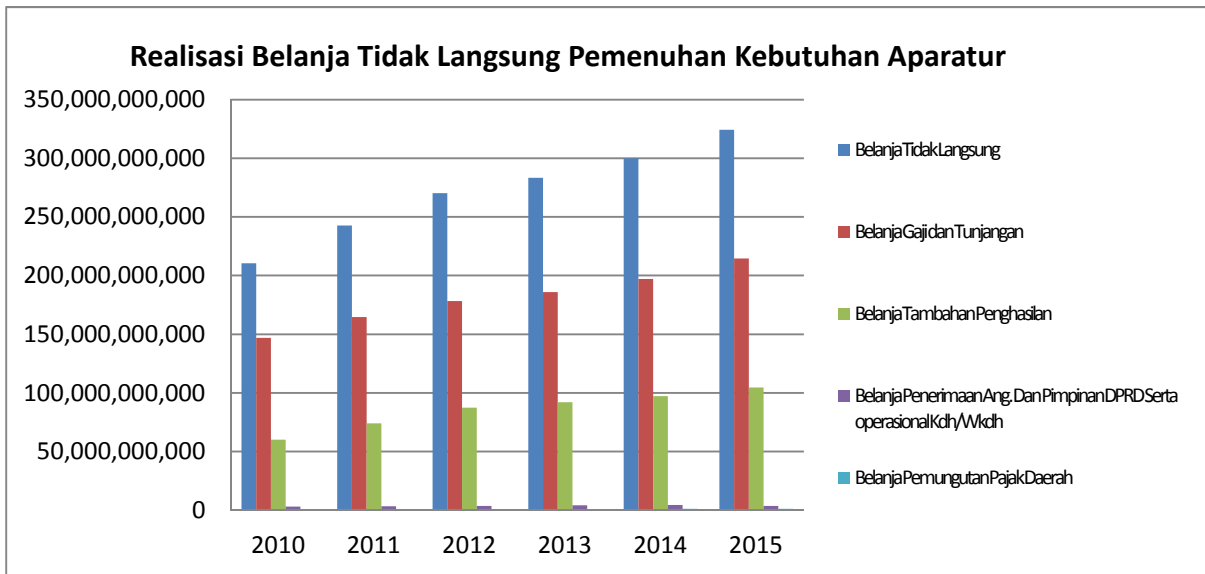


total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada data tersebut diatas dari tahun 2010 s.d 2015 secara prosentase terjadi penurunan, sebagaimana terlihat pada **Tabel.T-3.14** diatas, dan data tersebut diatas diperoleh dari perhitungan tabel Realisasi belanja pemenuhan aparatur dibawah ini dengan membandingkan total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran):

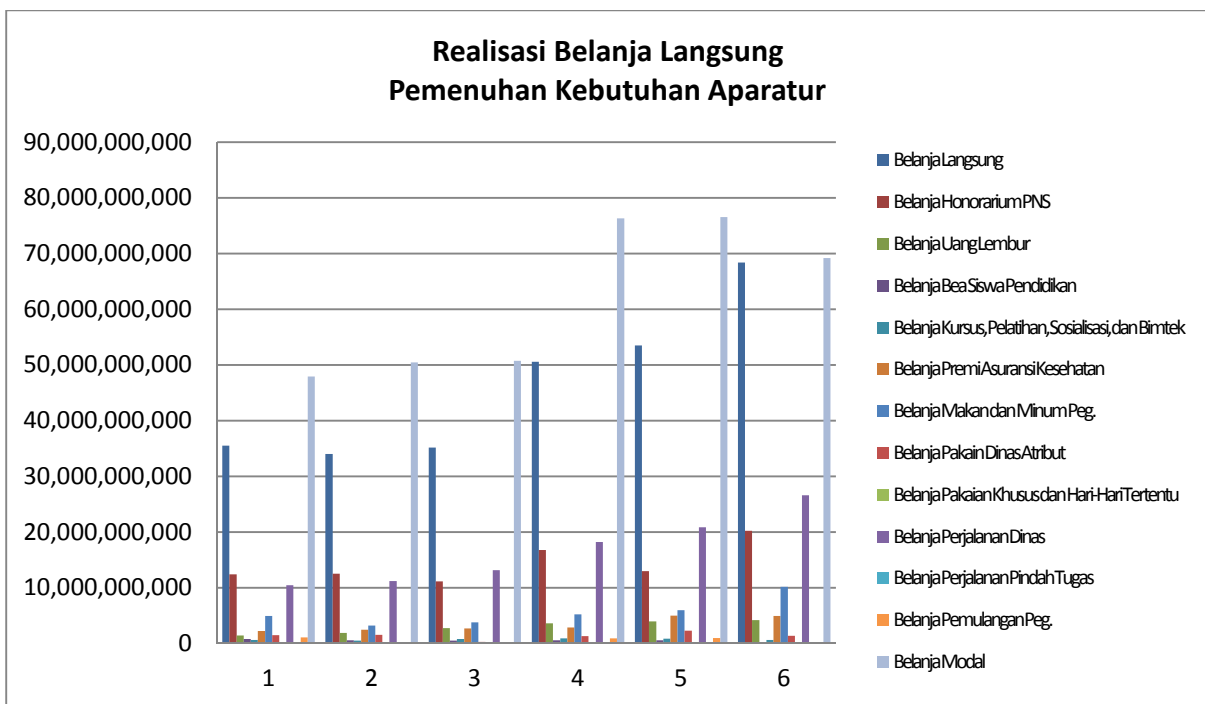
Tabel.3.15
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata
A	Belanja Tidak Langsung	210.599.184.116	242.666.447.174.	270.191.741.190.	283.326.771.150.	299.838.901.630.	324.221.452.977	6,97 %
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	147.046.237.783	164.771.618.464.	178.215.649.652.	185.985.440.660.	197.064.506.190.	214.692.593.464.	6,39 %
2	Belanja Tambahan Penghasilan	60.176.956.874	73.958.452.529.	87.459.426.900.	92.175.563.098.	97.270.638.979.	104.580.877.282.	8,20 %
3	Belanja Penerimaan Ang. Dan Pimpinan DPRD Serta operasional Kdh/Wkdh	3.199.452.752	3.332.439.992.	3.649.736.471.	4.199.132.184.	4.405.669.919.	3.689.180.780	1,77 %
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	176.536.707	603.936.189.	866.928.167.	966.635.208.	1.098.086.542.	1.258.801.451.	16,35 %
B	Belanja Langsung	35.534.337.856	33.995.652.476.	35.162.787.069.	50.561.521.927.	53.472.374.581.	68.384.490.073	14,85 %
1	Belanja Honorarium PNS	12.403.606.403	12.510.184.050.	11.136.296.069.	16.789.032.864.	12.964.456.206.	20.229.771.900	6,94 %
2	Belanja Uang Lembur	1.404.642.300	1.884.238.000.	2.734.034.000.	3.600.115.000.	3.979.190.750.	4.165.511.700	17,29 %
3	Belanja Bea Siswa Pendidikan	797.456.000	548.300.000.	535.893.000.	561.503.150.	584.210.365.	234.608.000	2,04 %
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek	627.893.475	520.036.135.	787.715.210.	888.661.090.	830.859.952.	642.728.505	2,28 %
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.217.984.830	2.489.712.000.	2.712.693.435.	2.872.919.450.	4.981.817.083.	4.909.855.265	13,12 %
6	Belanja Makan dan Minum Peg.	4.956.029.522	3.207.082.092.	3.759.767.985.	5.214.657.399.	5.980.111.696.	10.140.300.301	24,11 %
7	Belanja Pakain Dinas Atribut	1.507.265.820	1.538.136.925.	256.207.000.	1.321.315.330.	2.276.571.360.	1.345.893.373	17,79 %
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.335.800	38.489.000.	35.329.800.	68.381.800.	78.000.000.	102.030.500	18,81 %
9	Belanja Perjalanan Dinas	10.476.123.706	11.197.635.624.	13.127.357.120	18.181.935.069.	20.850.842.969.	26.613.790.529	19,24 %
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-	-	0
11	Belanja Pemulangan Peg.	1.112.000.000	61.838.650.	77.493.450.	896.120.300.	946.314.200.	-	29,21 %
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan Dll)	47.917.815.815	50.457.245.860.	50.734.638.592.	76.293.325.283.	76.551.550.636.	69.174.912.576	5,94 %
	TOTAL	294.051.337.787.	327.119.345.510.	356.089.166.851.	410.181.618.360.	429.862.826.847.	461.780.855.626	8,14 %

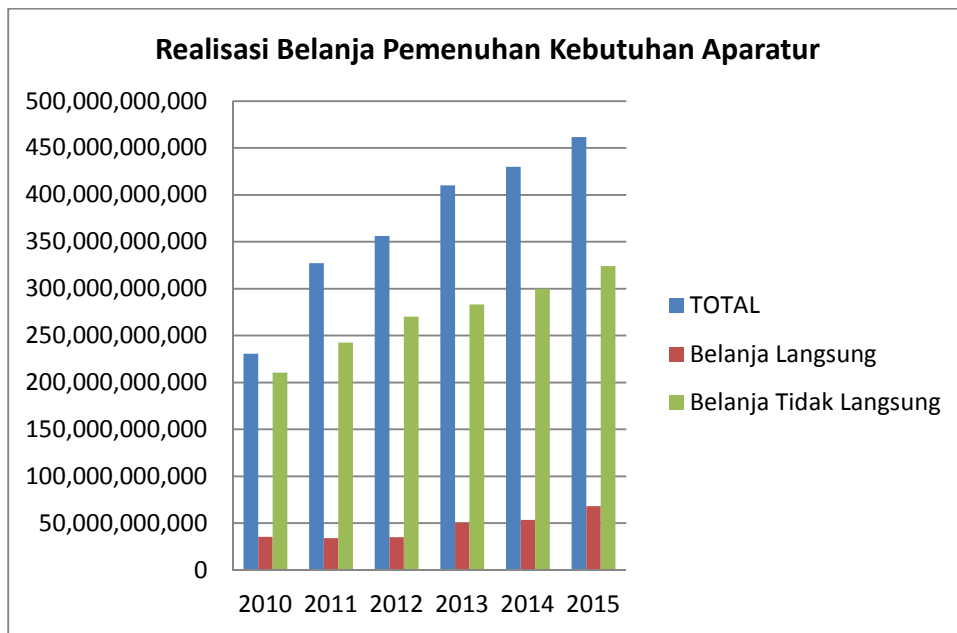
GRAFIK 3.15.1



GRAFIK 3.15.2



GRAFIK 3.15.3



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

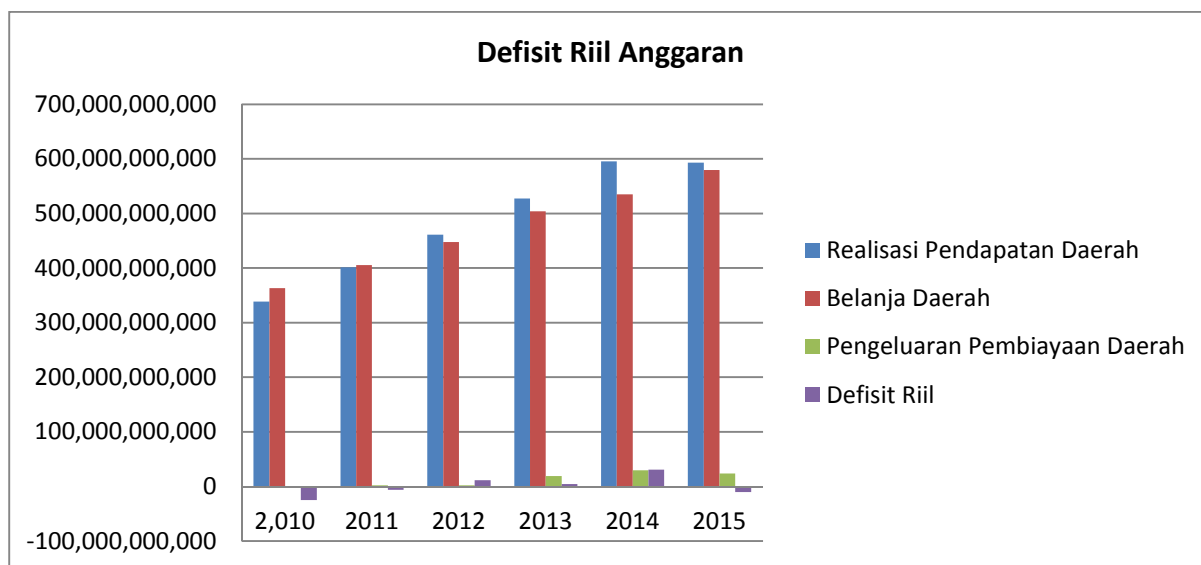
Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mengetahui lebih lanjut defisit riil Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel.3.16
Defisit Riil Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	338.421.473.678	401.417.194.463	461.396.488.849	527.475.062.408	595.424.983.587	593.323.296.014
	Dikurangi Realisasi:						
2	Belanja Daerah	363.236.193.806	405.420.576.374.	447.442.753.557.	504.110.258.149	535.168.579.302.	579.515.283.167
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000.000	2.311.546.513.	2.370.000.000.	18.932.000.000.	29.583.000.000.	23.883.000.000

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
	Defisit Riil	(24.834.720.128)	(6.314.928.424)	11.583.735.292.	4.432.804.259.	30.673.404.285.	(10.074.987.153)

GRAFIK 3.16



Berdasarkan tabel dan grafik diatas selama kurun waktu 2010-2015, defisit riil anggaran Kota Bukittinggi mengalami fluakuasi, pada tahun 2010, 2011 dan 2015 yang mengalami defisit sebesar Rp.24.834.720.128, Rp.6.314.928.424,- dan Rp.10.074.987.153,- sedangkan untuk tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi total realisasi belanja daerah setelah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah, masing-masing sebesar Rp. 11.583.735.291,46 dan Rp. 4.432.804.258,40 serta Rp.30.673.404.285,-.

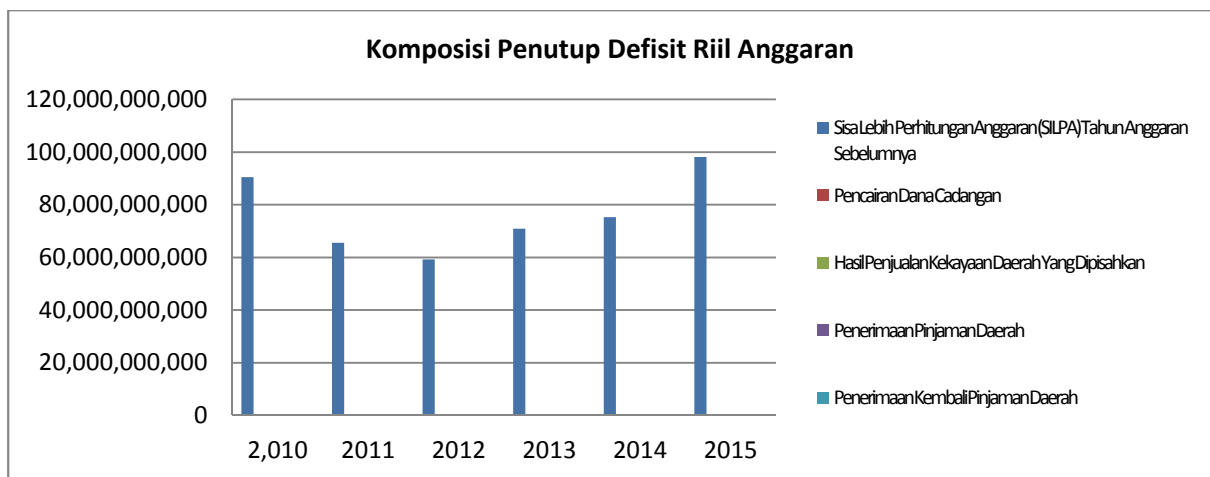
Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

Tabel 3.17
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	90.458.297.347	65.622.525.392	59.307.566.800	70.892.029.222	75.324.136.518	98.224.027.131
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-

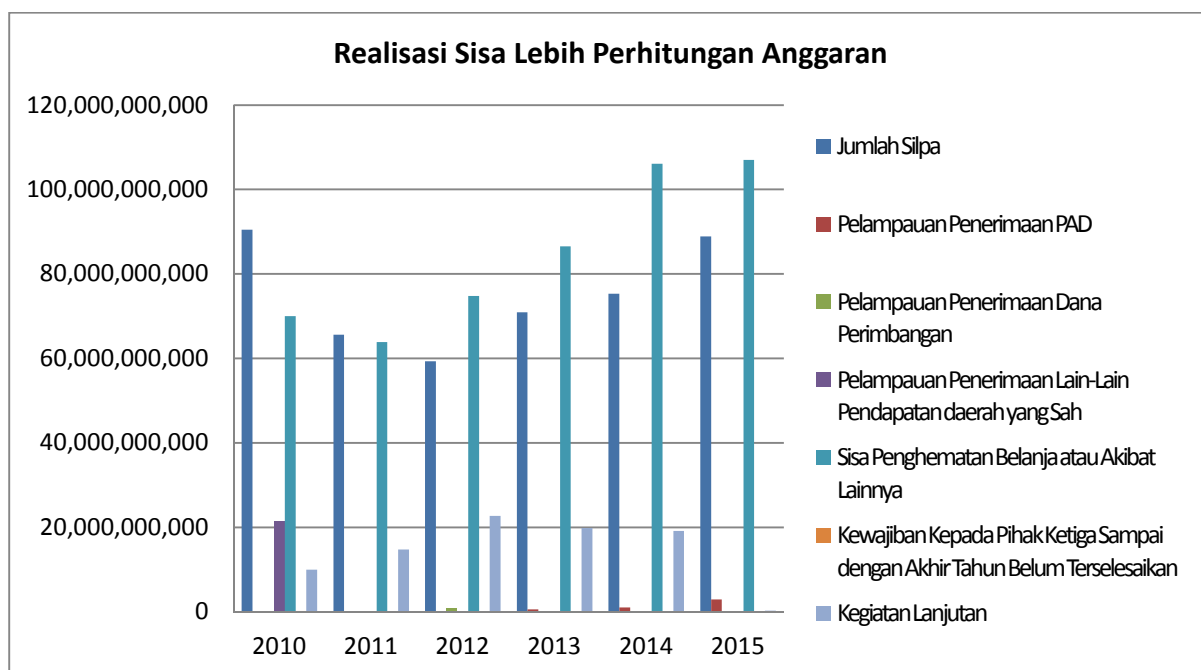
GRAFIK 3.17



Tabel.3.18
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	% Dari Silpa	(Rp)	% Dari Silpa	(Rp)	% Dari Silpa	(Rp)	% Dari Silpa	(Rp)	% Dari Silpa	(Rp)	% Dari Silpa
1	Jumlah Silpa	90.459.676.600		65.622.525.392	-	59.307.566.800	-	70.892.029.222	-	75.324.136.518	-	98.224.027.131	-
2	Pelampauan Penerimaan PAD			-		-		557.235.655	0,79	1.035.383.121	1,37	2.937.693.604	3,30
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan			-	-	856.907.495	1,44	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah	21.371.218.178	22,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	70.004.789.127	77,39	63.832.777.833	97,27	74.761.072.571	126,06	86.545.886.582	122,19	106.104.043.829,00	140,86	106.981.811.167,00	120,38
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselamatkan	202.935.093	0,22	20.199.919	0,03	727.131	0,001	5.051.841	0,006	-	-	9.405.856	0,01
7	Kegiatan Lanjutan	9.971.996.830	11,02	14.780.228.400	22,52	22.700.042.400	38,28	19.786.332.540	27,91	19.124.307.540	25,39	290.281.915	0,33

GRAFIK 3.18



Dari Tabel. **T.3.16** diatas terlihat bahwa pada tahun 2012-2014 Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada tahun tersebut surplus riilnya mencapai Rp.11.583.735.291,- Rp. 4.432.804.258,- dan Rp. 30.673.404.285,- Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif.

Bermakna positif Jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah.

SILPA yang terdapat pada APBD Kota Bukittinggi sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SILPA Kota Bukittinggi dapat diperkecil.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Pertumbuhan belanja periodik prioritas utama untuk belanja tidak langsung Kota Bukittinggi berasal dari belanja gaji dan tunjangan dan belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta Op.Kdh/Wkdh, masing masing 7,27% dan 8,54%. Sedangkan untuk belanja langsung pertumbuhan berasal dari belanja jasa kantor, belanja bea siswa pendidikan PNS, dan belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis masing-masing 15,63% , 5,57% dan 10,81%.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi : proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Proyeksi pendapatan

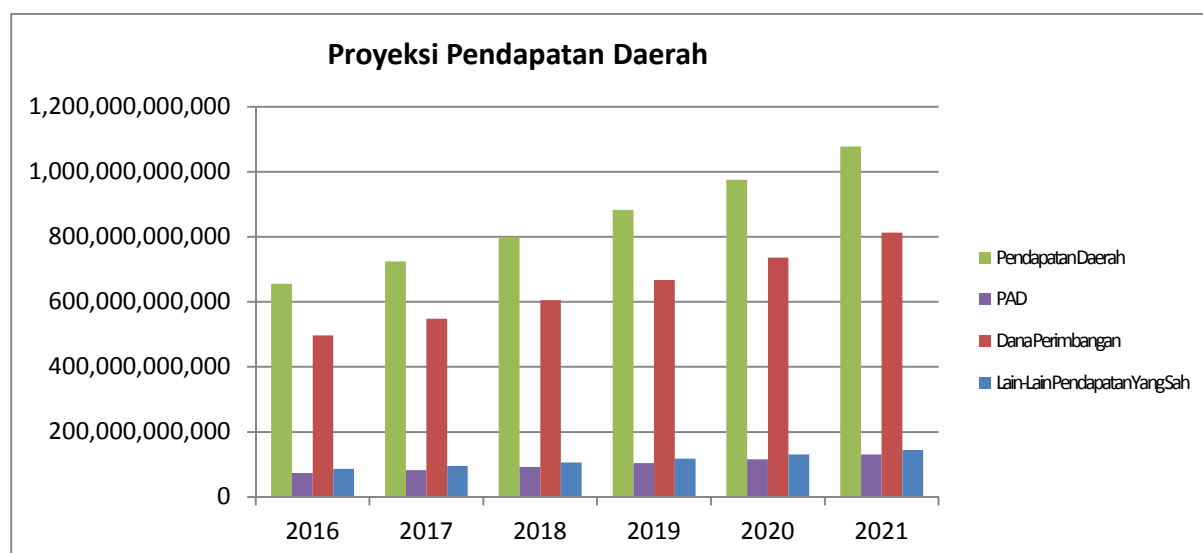
Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan selama tahun 2010-2015. Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 655,325 milyar, dan meningkat menjadi Rp. 723,807 milyar pada tahun 2017. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan akan menjadi Rp. 1,077 triliun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

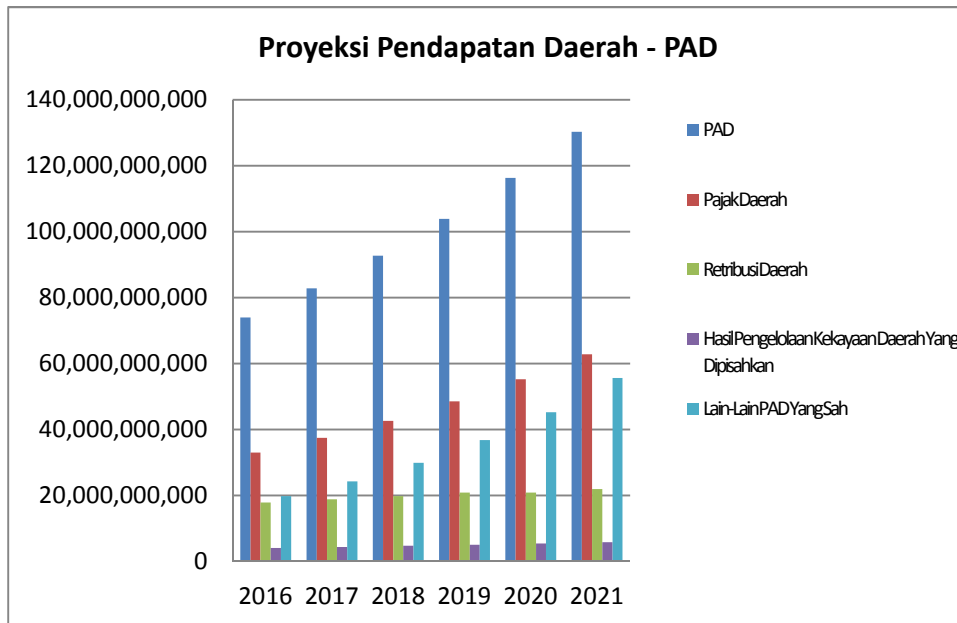
Tabel.3.19
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Proyeksi					
		Th.2016 (Rp)	Th.2017 (Rp)	Th.2018 (Rp)	Th.2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
	Pendapatan Daerah	655.325.580.447	723.807.103.603	799.444.945.929	882.986.942.778	975.259.078.298	1.077.173.651.980
A	PAD	74.161.930.433	83.298.680.262	93.561.077.670	105.087.802.438	118.034.619.698	132.576.484.844
1	Pajak Daerah	33.648.499.682	39.038.989.331	45.293.035.421	52.548.979.695	60.967.326.242	70.734.291.906
2	Retribusi Daerah	17.991.825.075	19.006.564.009	20.078.534.219	21.210.963.549	22.407.261.893	23.671.031.463
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.322.456.367	4.810.029.445	5.352.600.766	5.956.374.132	6.628.253.134	7.375.920.087
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	18.087.916.759	20.309.112.937	22.803.072.005	25.603.289.247	28.747.373.166	32.277.550.590
B	Dana Perimbangan	490.001.368.866	533.709.490.968	581.316.377.562	633.169.798.440	689.648.544.460	751.165.194.625
1	Bagi Hsl Pjk/Bkn Pjk	14.065.956.964	15.758.091.586	17.653.790.038	19.777.540.975	22.156.779.154	24.822.239.686
2	DAU	448.687.434.798	492.658.803.408	540.939.366.142	593.951.424.023	652.158.663.577	716.070.212.607
3	DAK	30.431.548.492	32.293.959.259	34.270.349.565	36.367.694.958	38.593.397.889	40.955.313.839
C	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	90.554.191.373	105.912.182.230	123.874.888.336	144.884.069.397	169.456.407.566	198.196.214.289
1	Dana Bagi Hsl Pjk Provinsi	24.457.386.951	28.072.188.742	32.221.258.238	36.983.560.205	42.449.730.403	48.723.800.556
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.309.104.948	53.628.959.577	53.950.733.334	54.274.437.734	54.600.084.360	54.927.684.866

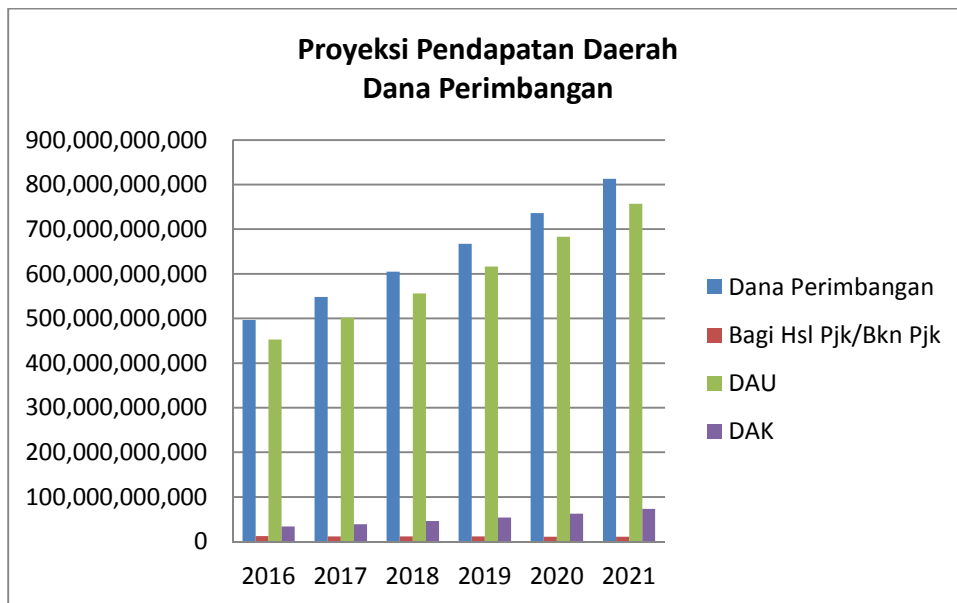
GRAFIK 3.19.1



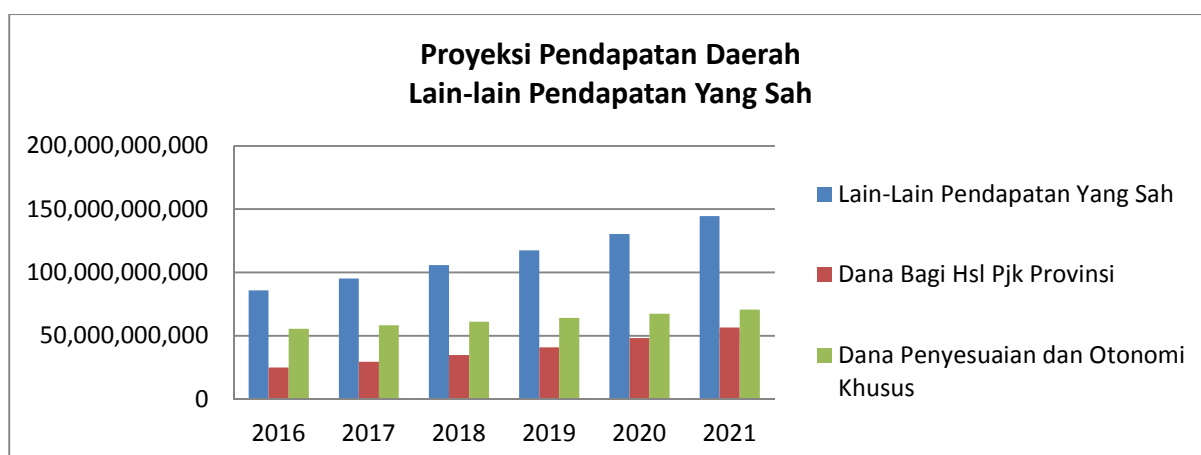
GRAFIK 3.19.2



GRAFIK 3.19.3



GRAFIK 3.19.4



Tabel dan grafik tersebut diatas berdasarkan perhitungan dari **Tabel 3.1** dengan mempergunakan sebagai tahun dasar tahun 2015 yang dikalikan dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, yaitu Pendapatan daerah tumbuh rata-rata sebesar 10,45%, PAD sebesar 12,32%, Pajak daerah sebesar 16,02%, Retribusi daerah sebesar 5,64%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 11,28%, Lain-lain PAD yang sah sebesar 12,28%, Dana perimbangan sebesar 8,92%, Dana bagi hasil pajak/Bukan pajak turun sebesar sebesar (12,03%), DAU sebesar 9,80%, DAK sebesar 6,12%, Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 16,96%, Dana bagi hasil pajak propinsi sebesar 14,78%, dan Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 0,60%.

Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam rangka melakukan proyeksi terhadap Pendapatan daerah untuk Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut;

1. Memperhatikan tingkat pertumbuhan rata-rata dari setiap komponen pendapatan pada tahun 2010 – 2015 .
2. Tidak adanya perubahan yang mendasar terhadap regulasi yang mengatur tentang Pendapatan Daerah.
3. Tidak adanya perubahan terhadap komponen- komponen pendapatan daerah.

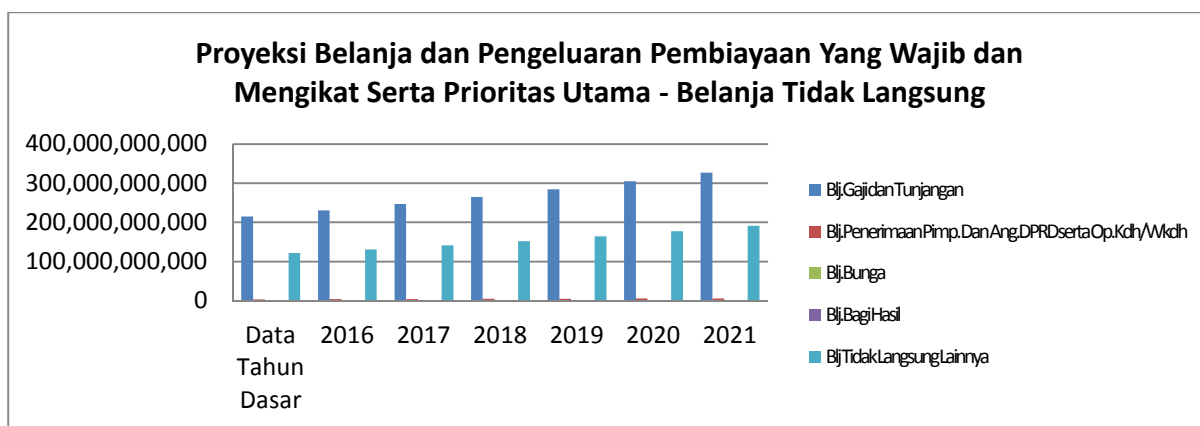
2). Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama

Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2016-2021 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

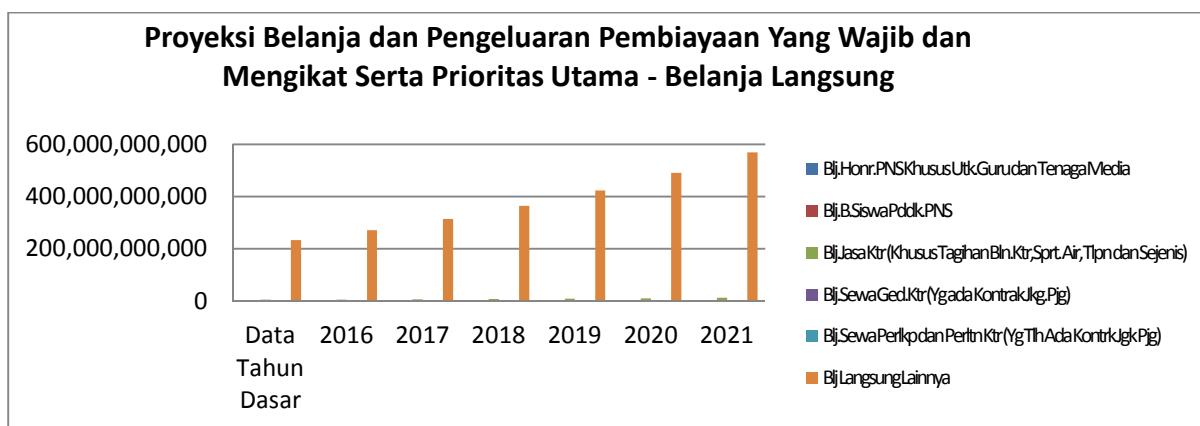
Tabel.3.20
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan
Mengikat Serta Prioritas Utama
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Pertumbuhan (%)	PROYEKSI					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
A	Blj.Tidak Langsung	339.899.689.457.	7,21	364.406.457.066	390.680.162.620	418.848.202.344	449.047.157.733	481.423.457.805	516.134.089.112
1	Blj.Gaji dan Tunjangan	214.692.593.464	7,27	230.300.745.008	247.043.609.170	265.003.679.556	284.269.447.059	304.935.835.860	327.104.671.127
2	Blj.Penerimaan Pimp. Dan Ang.DPRD serta Op.Kdh/Wkdh	3.689.180.780.	8,54	4.004.236.681	4.346.198.505	4.717.363.857	5.120.226.730	5.557.494.092	6.032.104.087
.3	Blj.Bunga	-	-						
4	Blj.Bagi Hasil	-	-						
	Blj Tidak Langsung Lainnya	121.517.915.213	7,83	131.032.767.974	141.292.633.706	152.355.846.925	164.285.309.739	177.148.849.491	191.019.604.406
B	Blj.Langsung	239.615.593.710.	15,68	277.187.318.803	320.650.290.391	370.928.255.924	429.089.806.452	496.371.088.103	574.202.074.717
1	Blj.Honr.PNS Khusus Utk.Guru dan Tenaga Media	683.772.500	10,81	757.688.307	839.594.413	930.354.569	1.030.925.897	1.142.368.986	1.265.859.073
2	Blj.B.Siswa Pddk.PNS	234.608.000	5,57	247.675.665	262.471.199	277.035.144	292.466.001	308.756.357	325.954.086
3	Blj.Jasa Ktr (Khusus Tagihan Bln.Ktr,Sprt. Air, Tlpn dan Sejenis)	5.178.107.918	15,63	5.987.446.185	6.923.284.023	8.005.393.315	9.256.636.290	10.703.448.542	12.376.397.549
4	Blj.Sewa Ged.Ktr (Yg ada Kontrak Jkg.Pjg)	-	-						
5	Blj.Sewa Perlkp dan Perltan Ktr (Yg Tlh Ada Kontrk Jkg Pjg)	-	-						
	Blj Langsung Lainnya	233.519.105.292	15,99	270.858.810.228	314.169.133.983	364.404.778.506	422.673.102.589	490.258.531.693	568.650.870.910
C	Penglirn.Pembayaan	23.883.000.000.	20,27	28.724.084.100	34.546.455.947	41.549.022.567	49.971.009.441	60.100.133.054	72.282.430.024
1	Pembtk.Dana Cad.	15.000.000.000	13,33	16.999.500.000	19.265.533.350	21.833.628.945	24.744.051.683	28.042.433.772	31.780.490.193
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-						
	Penglirn Pembiayaan Lainnya	8.883.000.000	47,06	13.063.339.800	19.210.947.509	28.251.619.407	41.546.831.500	61.098.770.403	89.851.851.754
	TOTAL A+B+C	603.398.283.167	11,87	675.021.659.378	755.146.730.346	844.782.647.238	945.058.347.465	1.057.236.773.309	1.182.730.778.300

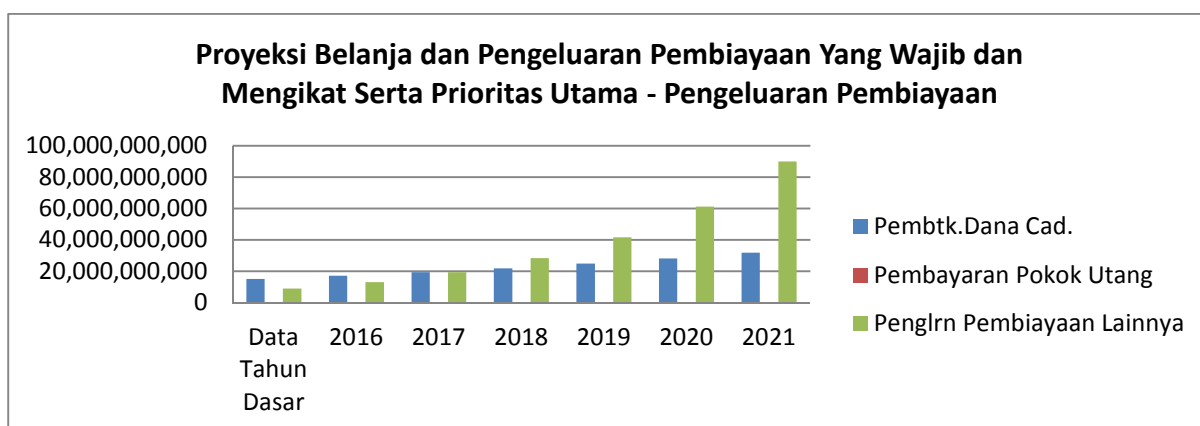
GRAFIK 3.20.1



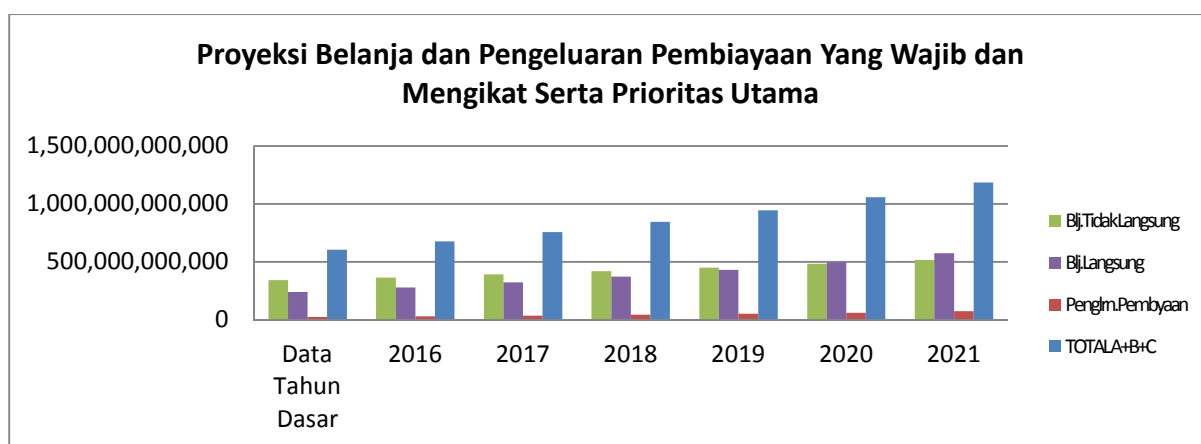
GRAFIK 3.20.2



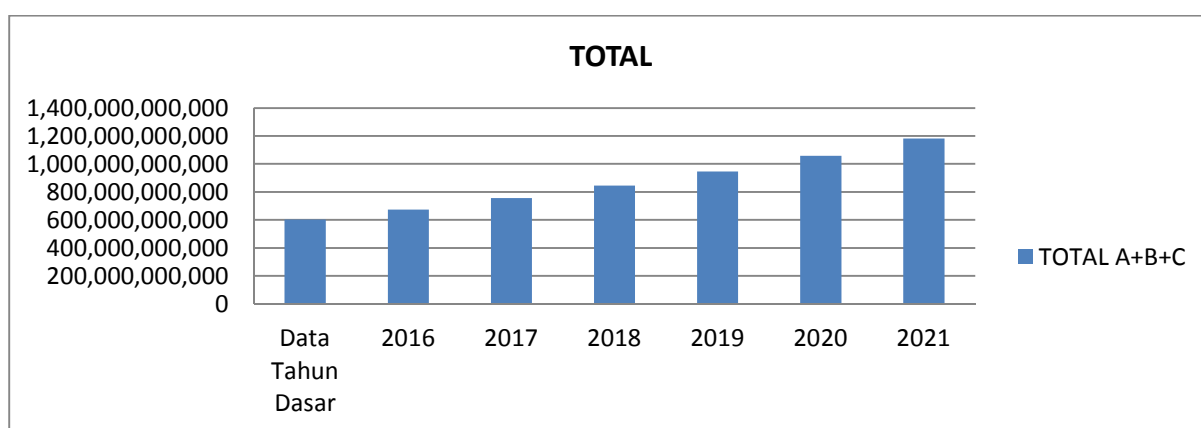
GRAFIK 3.20.3



GRAFIK 3.20.4



GRAFIK 3.20.5



Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam rangka melakukan proyeksi terhadap Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, adalah sebagai berikut;

1. Memperhatikan tingkat pertumbuhan rata-rata dari setiap komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2010 – 2015.
2. Tidak adanya perubahan yang mendasar terhadap regulasi yang mengatur tentang belanja dan pengeluaran pembiayaan.
3. Tidak adanya perubahan terhadap komponen- komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah.

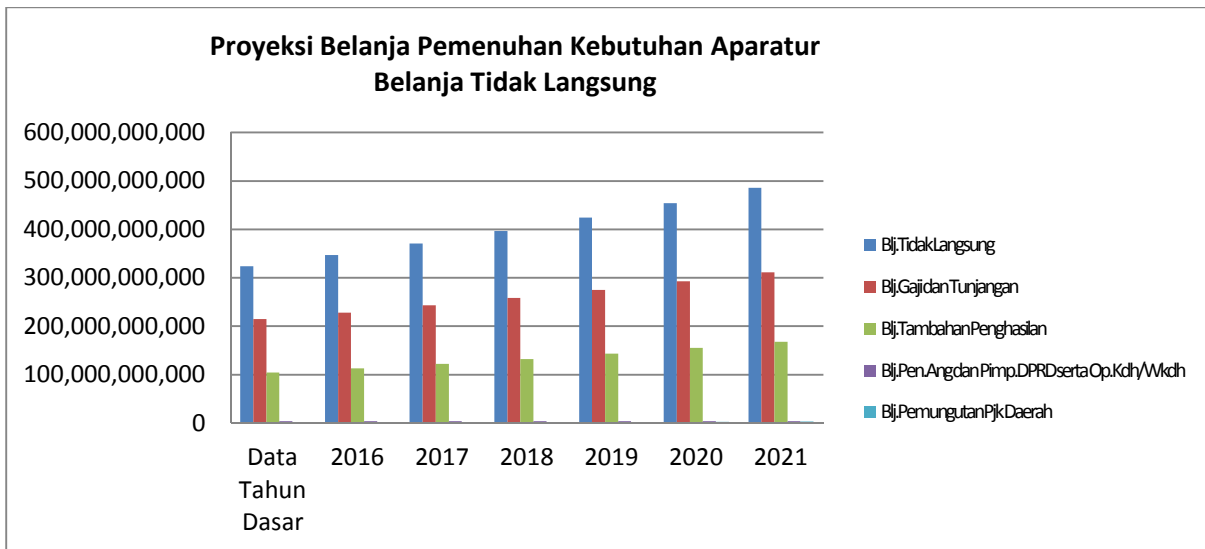
3) Proyeksi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proyeksi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk tahun anggaran 2016 – 2021 diproyeksikan cenderung meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

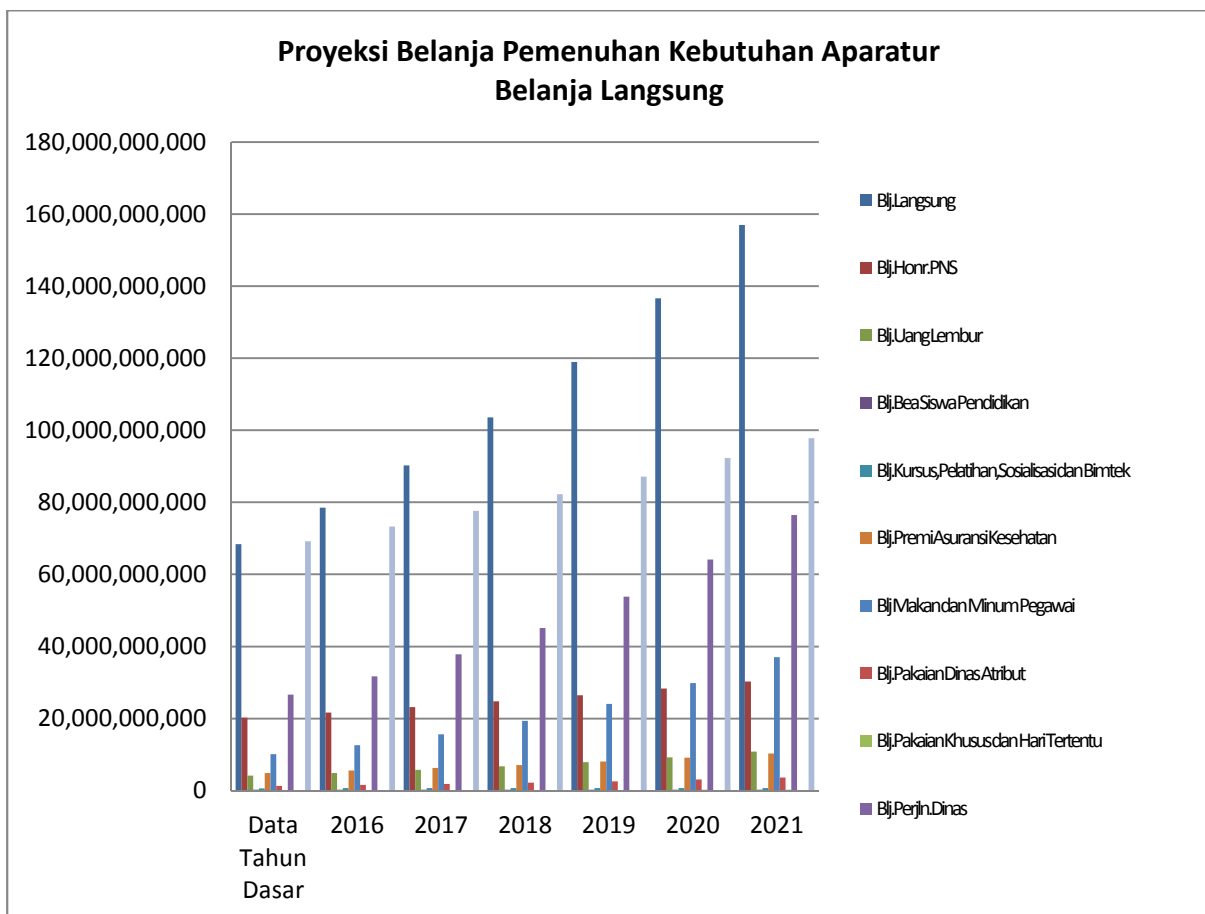
Tabel.3.21
Proyeksi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Pertumbuhan (%)	PROYEKSI					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
A	Blj.Tidak Langsung	324.221.452.977	6,97	346.819.688.249	370.993.020.519	396.851.234.049	424.511.765.062	454.100.235.086	485.751.021.471
1	Blj.Gaji dan Tunjangan	214.692.593.464	6,39	228.411.450.188	243.006.941.854	258.535.085.438	275.055.477.397	292.631.522.402	311.330.676.683
2	Blj.Tambahan Penghasilan	104.580.877.282	8,20	113.156.509.219	122.435.342.974	132.475.041.097	143.337.994.467	155.091.710.013	167.809.230.234
3	Blj.Pen.Ang dan Pimp.DPRD serta Op.Kdh/Wkdh	3.689.180.780.	1,77	3.754.479.279	3.820.933.562	3.888.564.086	3.957.391.670	4.027.437.502	4.098.723.145
4	Blj.Pemungutan Pjk Daerah	1.258.801.451	16,35	1.464.615.488	1.704.080.120	1.982.697.219	2.306.868.214	2.684.041.167	3.122.881.897
B	Blj.Langsung	68.384.490.073	14,85	78.539.586.848	90.202.715.495	103.597.818.746	118.982.094.829	136.650.935.911	156.943.599.893
1	Blj.Honr.PNS	20.229.771.900	6,94	21.633.718.069	23.135.098.103	24.740.673.911	26.457.676.680	28.293.839.441	30.257.431.898
2	Blj.Uang Lembur	4.165.511.700	17,29	4.885.728.672	5.730.471.159	6.721.269.622	7.883.377.139	9.246.413.046	10.845.117.861
3	Blj.Bea Siswa Pendidikan	234.608.000	2,04	239.394.003	244.277.640	249.260.903	254.345.825	259.534.479	264.828.982
4	Blj.Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimtek	642.728.505	2,28	657.382.714	672.371.039	687.701.098	703.380.683	719.417.762	735.820.486
5	Blj.Premi Asuransi Kesehatan	4.909.855.265	13,12	5.554.028.275	6.282.716.784	7.107.009.226	8.039.448.836	9.094.224.523	10.287.386.780
6	Blj.Makan dan Minum Pegawai	10.140.300.301	24,11	12.585.126.703	15.619.400.751	19.385.238.272	24.059.019.219	29.859.648.752	37.058.810.066
7	Blj.Pakaian Dinas Atribut	1.345.893.373	17,79	1.585.327.804.	1.867.357.620	2.199.560.540	2.590.862.360	3.051.776.773	3.594.687.861
8	Blj.Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	102.030.500	18,81	121.222.437	144.024.377	171.115.362	203.302.161	241.543.297	286.977.591
9	Blj.Perjln.Dinas	26.613.790.529	19,24	31.734.283.826	37.839.960.034	45.120.368.344	53.801.527.213	64.152.941.048	76.495.966.905
10	Blj.Perjln.Pindah Tugas	0	-	-	-	-	-	-	-
11	Blj.Pemulangan Pegawai	0	-	-	-	-	-	-	-
12	Blj.Modal (Ktr,Mobil Dinas,Meubiler,Peralatan dan Perlengkapan	69.174.912.576	5,94	73.283.902.383	77.636.966.184	82.248.601.975	87.134.168.932	92.309.938.566	97.793.148.916
	TOTAL	461.780.855.626	8,14	499.369.817.273	540.018.520.399	583.976.027.959	631.511.676.634	682.916.727.112	738.506.148.698

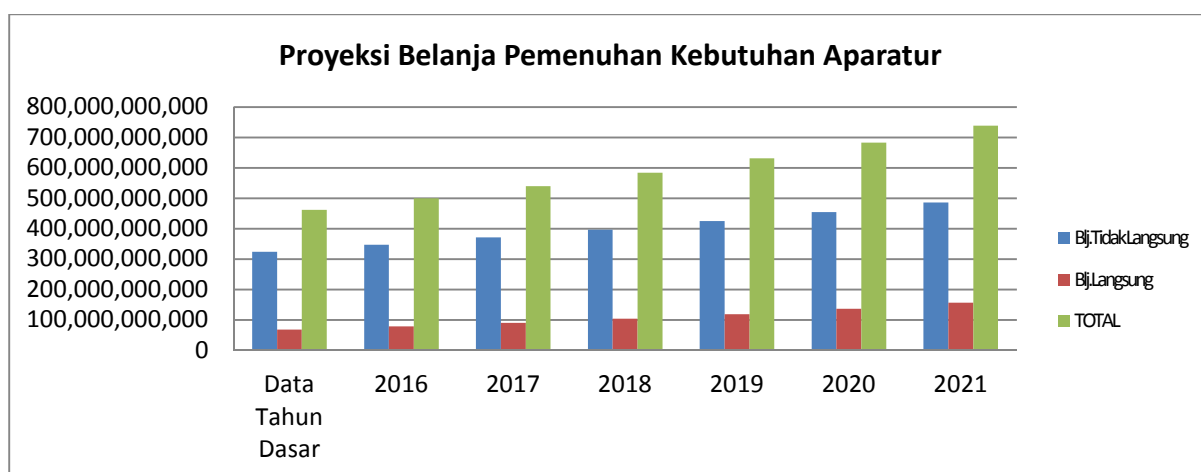
GRAFIK 3.21.1



GRAFIK 3.21.2



GRAFIK 3.21.3



3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang (2016-2021), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Bukittinggi diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 tahun 2010-2015 daya serap anggaran, pada belanja langsung rata-rata hanya mampu menyerap 76,05% anggaran, Hal ini tidak dapat dikatakan seutuhnya dari efisiensi, yaitu sebesar 23,95%. Beberapa data diantaranya adalah sebagai berikut daya serap rata-rata dari jenis belanja langsung;

- pada jenis belanja pegawai daya serap 85,71%
- pada jenis belanja barang dan jasa 73,05%
- pada belanja modal 72,13%

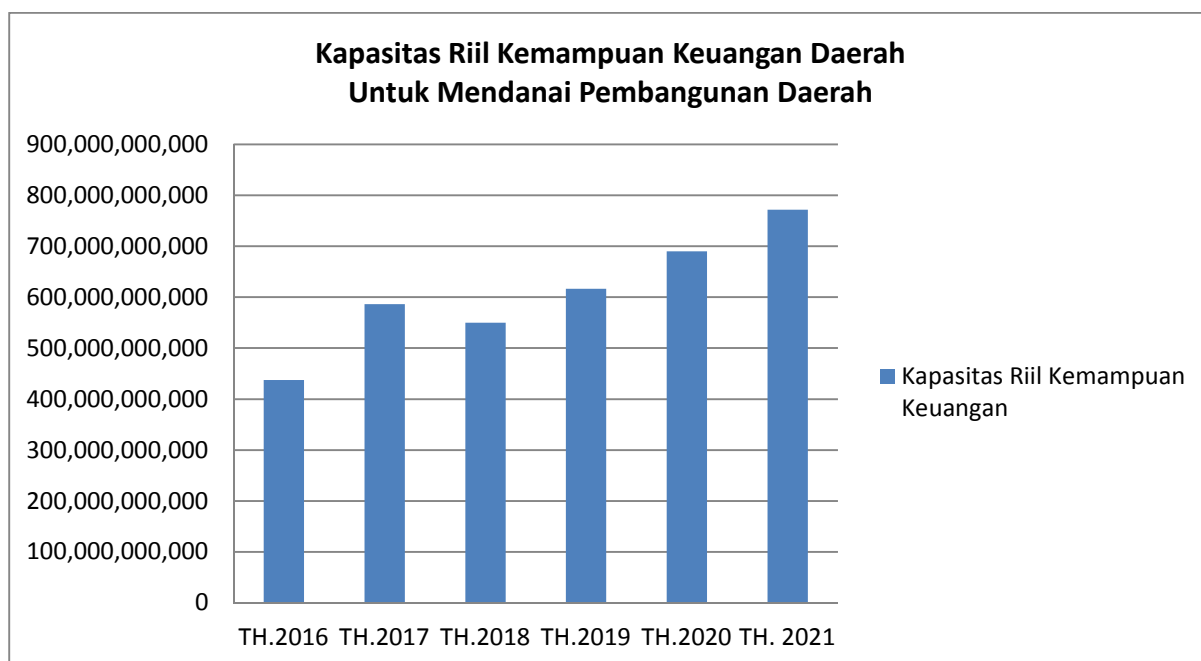
Berdasarkan data tersebut diatas SILPA akan terjadi, diskenariokan sebesar **6%** pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasi diatas 6%, selisih tersebut akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial.

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapanya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel.3.22
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Proyeksi					
		TH.2016 (Rp)	TH.2017 (Rp)	TH.2018 (Rp)	TH.2019 (Rp)	TH.2020 (Rp)	TH. 2021 (Rp)
1	Pendapatan	655.325.580.447	723.807.103.603	799.444.945.929	882.986.942.778	975.259.078.298	1.077.173.651.980
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	95.809.822.878	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	39.319.534.826	43.428.426.216	47.966.696.755	52.979.216.566	58.515.544.697	64.630.419.118
	Total Penerimaan	694.645.115.273	863.045.352.697	847.411.642.684	935.966.159.344	1.033.774.622.995	1.141.804.071.098
	Dikurangi:						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	257.296.041.214	276.525.899.638	297.290.638.957	319.725.034.557	343.977.144.759	370.209.776.142
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	437.349.074.059	586.519.453.059	550.121.003.727	616.241.124.787	689.797.478.236	771.594.294.956

GRAFIK 3.22



Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari **Rp 257,296** milyar di tahun 2016 menjadi sebesar **Rp 370,209** milyar di tahun 2021. Belanja tidak langsung dalam hal ini merupakan bagian yang sangat dominan dalam total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama.

Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam rangka melakukan proyeksi terhadap Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah dalam rangka mendanai pembangunan daerah, adalah sebagai berikut;

1. Proyeksi pendapatan daerah harus sesuai dengan **Tabel 3.19**
2. Sisa lebih perhitungan anggaran diskenariokan 6% setiap tahunnya.
3. Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan hasil dari penjumlahan yang terdapat pada **Tabel.3.20**

3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya serap yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi **Perangkat Daerah**

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja

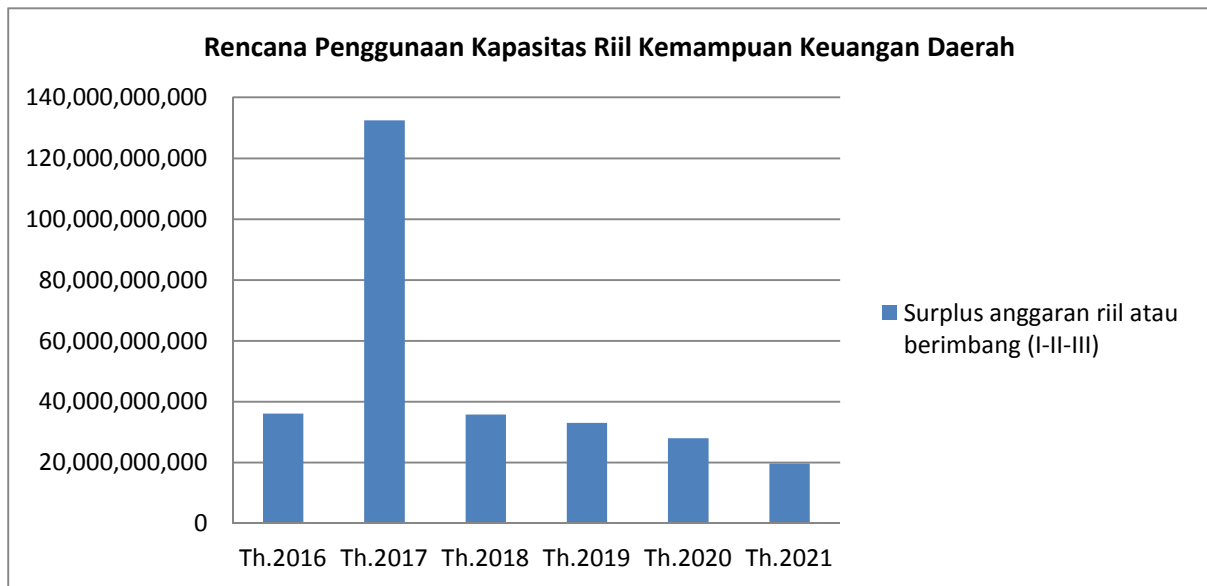
hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Berkaitan dengan hal tersebut Alokasi kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.3.23
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Proyeksi					Th.2021 (Rp)
		Th.2016 (Rp)	Th.2017 (Rp)	Th.2018 (Rp)	Th.2019 (Rp)	Th.2020 (Rp)	
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	437.349.074.059	586.519.453.059	550.121.003.727	616.241.124.787	689.797.478.236	771.594.294.956
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	277.187.318.803	320.650.290.391	370.928.255.924	429.089.806.452	496.371.088.103	574.202.074.717
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	16.999.500.000	19.265.533.350	21.833.628.945	24.744.051.683	28.042.433.772	31.780.490.193
	Dikurangi:						
II.c	Belanja Langsung Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	6.930.160.088	7.881.013.376	8.965.732.695	10.203.394.650	11.615.812.515	13.227.930.449
II.d	Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	16.999.500.000	19.265.533.350	21.833.628.945	24.744.051.683	28.042.433.772	31.780.490.193
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	270.257.158.719	312.769.277.019	361.962.523.229	418.886.411.802	484.755.275.588	560.974.144.268
	Sisa Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	167.091.915.344	273.750.176.040	188.158.480.498	197.354.712.989	205.042.202.648	210.620.150.688
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung	364.406.457.066	390.680.162.620	418.848.202.344	449.047.157.733	481.423.457.805	516.134.089.112
	Dikurangi:						
III.b	Belanja Tidak Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	233.366.381.126	249.379.352.912	266.491.277.317	284.777.588.224	304.318.898.472	325.201.355.500
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	131.040.075.940	141.300.809.708	152.356.925.027	164.269.569.509	177.104.559.333	190.932.733.612
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)	36.051.839.400	132.449.366.332	35.801.555.471	33.085.143.476	27.937.643.315	19.687.417.078

GRAFIK 3.23



Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diproyeksikan dari tahun 2016 s.d 2021 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel diatas, setelah dikurangi dengan total rencana pengeluaran prioritas I ditambah dengan total rencana pengeluaran prioritas II masih terdapat surplus anggaran riil sebesar Rp.36.051 milyar untuk Ta.2016, Rp.132,449 milyar untuk Ta.2017, Rp.35,801 milyar untuk Ta.2018, Rp.33,085 milyar untuk Ta.2019, Rp.27,937 milyar untuk Ta.2020, dan Rp.19.687 milyar untuk Ta.2021, hal ini menunjukkan secara proyeksi untuk lima tahun kedepan Pemerintah Kota Bukittinggi setiap tahunnya mempunyai kemampuan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.